

# MANAJEMEN RISIKO

INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA



**Piagam Manajemen  
Risiko**

ITJ-05.OT.03 TAHUN  
2021

**SK Pengelola  
Penerapan MR pada  
UPR Inspektorat  
Jenderal**

ITJ--4.OT.03 TAHUN  
2021

**SK Susunan Tim  
Kerja Penyusunan  
Penerapan MR**

ITJ-05.OT.03 TAHUN  
2021



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO**

**NOMOR : ITJ-05.OT.03 TAHUN 2021**

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya menyatakan bahwa :

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan proses manajemen risiko yang meliputi Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko (Daftar Risiko), Analisa Risiko (Peta/Profil Risiko), Evaluasi Risiko (Prioritas, Toleransi dan Indikator Risiko), Penanganan/Mitigasi Risiko (Rencana Aksi Penanganan);
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Rencana penanganan risiko yang dituangkan dalam Piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
4. Untuk meningkatkan efektifitas Penerapan Manajemen Risiko akan dilakukan pemantauan secara berkala (per semester) dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

Ditetapkan di Jakarta,  
Tanggal 3 Maret 2021  
Inspektur Jenderal

  
**ANDAP BUDHI REVIANTO**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : ITJ-01.OT.03 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Penerapan Manajemen Risiko pada unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pemilik risiko unit utama perlu dibentuk tim;
  - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Susunan Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652)
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
15. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Kerja yang melakukan Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko pada unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya di sebut Tim Pemilik Risiko Unit Utama.
- KEDUA : Menunjuk pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menyusun Piagam Manajemen Risiko.
1. Menyusun penetapan tujuan meliputi strategi, program/kegiatan, sasaran strategis, indikator kinerja dan permasalahan baik bersumber dari rencana strategis maupun hasil identifikasi pengawasan.
  2. Menyusun identifikasi risiko meliputi pernyataan risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, dampak risiko, pihak yang terkena risiko, pengendalian intern yang telah dilakukan, yang selanjutnya data tersebut menjadi Daftar Risiko.
  3. Menyusun peta risiko meliputi kemungkinan dan dampak risiko, nilai risiko, tingkat risiko dan profil risiko.
  4. Melakukan evaluasi risiko meliputi prioritas risiko, toleransi risiko, indikator risiko dan batas aman. Selanjutnya data tersebut menjadi data Indikator Risiko.
  5. Melakukan mitigasi risiko meliputi opsi penanganan risiko, kegiatan pengendalian, indikator pengendalian *output* dan target, jadwal capaian *output*, tanggung jawab dan capaian risiko (bila ada).
  6. Melakukan pemantauan atas mitigasi risiko meliputi realisasi target, indikator pengendalian realisasi target, indikator risiko dan risiko residu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 08 Februari 2021

Inspektur Jenderal,



ANDAP BUDHI REVIANTO

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Plt. Sekretaris Jenderal.

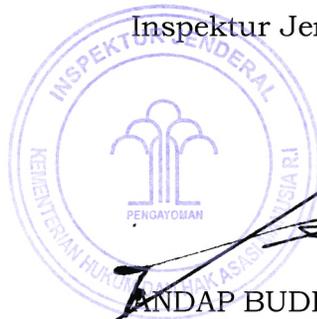
Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.  
Nomor : ITJ-01.OT.03 Tahun 2021  
Tanggal : 08 Februari 2021

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DILINGKUNGAN UNIT INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL NIP. 196308111988111001	Ketua
2	KEPALA BAGIAN PROGRAM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN NIP. 197212041999032001	Sekretaris Merangkap Anggota
3	MH. KESUMA NEGARA, S.H., M.M. NIP. 197101312003121001	Anggota
4	RINO ADI PUTRO, S.H. NIP. 199106052015031003	Anggota
5	SUPERMAN, S.E. NIP. 197003241999031001	Anggota
6	CHANDRA JULIUS F. MANALU, S.E. NIP. 197907152010121001	Anggota
7	MADDALENA SARAGI, S.H., M.Kn., M.M. NIP. 197412092005012001	Anggota
8	ZAIFACHATUR ROZIYAH, S.H., M.Si. NIP. 197912262005012001	Anggota
9	AGUNG NATANAEL, S.H., M.H. NIP. 197107231997031001	Anggota
10	PUJI RAHARTO, S.I.P., M.M. NIP. 196510211986031001	Anggota
11	ERBATA SRI MULIATINI, S.H. NIP. 197006061998032001	Anggota
12	PARLINDUNGAN DONNI, S.H., M.H NIP. 198809142007031001	Anggota
13	TATIE RAINI, S.Sos. NIP. 196206171986112001	Anggota
14	ARMAN SYAH RAZAK, S.E. NIP. 197702012009121002	Anggota
15	FIRMAN SEPTA FIRDAUS, S.H. NIP. 198209042006041001	Anggota
16	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN NIP. 197306231994032001	Anggota
17	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN NIP. 197301192001121001	Anggota
18	KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN NIP. 197505202001121002	Anggota
19	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI NIP. 197907172001121001	Anggota
20	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN NIP. 198604222006041002	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
21	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA NIP. 198409152010121002	Anggota
22	BAGUS DWI LAKSONO, S.Kom. NIP. 198609072015031003	Anggota
23	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN NIP. 198404242009011007	Anggota
24	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT NIP. 198008162009121003	Anggota
25	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI NIP. 197612262009121002	Anggota
26	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN NIP. 198310032009121010	Anggota
27	PRISI KHAIRANI ARIEF, S.H. NIP. 199402032017122001	Anggota
28	YORA ROLIN BANGUN, S.H. NIP. 19920824 2020121001	Anggota
29	ERVIANA RAHAYU, S.E. NIP. 199710142020122001	Anggota

Inspektur Jenderal,



*[Handwritten Signature]*  
ANDAP BUDHI REVIANTO



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : ITJ-04.OT.03 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELOLA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT UNIT UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat unit utama/unit eselon I (tingkat program) dan pemilik risiko tingkat unit eselon II (tingkat kegiatan) perlu dibentuk tim;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pengelola Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Unit Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
15. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT UNIT UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Penerapan Manajemen Risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dan apabila terdapat perubahan visi/misi/tujuan/sasaran/indikator kinerja, untuk segera dilakukan penyesuaian.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat pada Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-I Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- KETIGA : Unit Pemilik Risiko (UPR) Unit Utama mempunyai tugas :
- a. Menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko
  - b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko
  - c. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko

d. Menatausahakan proses manajemen risiko dalam bentuk Laporan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018, paling lambat tanggal 10 Juli untuk laporan semester I dan 10 Januari untuk laporan semester II.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 3 Maret 2021

Inspektur Jenderal,



ANDAP BUDHI REVIANTO

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Plt. Sekretaris Jenderal.

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.  
Nomor : ITJ-04.OT.03 TAHUN 2021  
Tanggal : 3 Maret 2021

**UNIT PEMILIK RISIKO UNIT UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1	Inspektur Jenderal	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
3	Kepala Bagian Program, Hubungan Masyarakat dan Pelaporan	Sekretaris merangkap anggota
4	Inspektur Wilayah I	Anggota
5	Inspektur Wilayah II	Anggota
6	Inspektur Wilayah III	Anggota
7	Inspektur Wilayah IV	Anggota
8	Inspektur Wilayah V	Anggota
9	Inspektur Wilayah VI	Anggota

Ket : Susunan Tim merujuk Permenkumham No.5 Th.2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Inspektur Jenderal,



**ANDAP BUDHI REVIANTO**

**MANAJEMEN RISIKO  
TINGKAT PROGRAM / UNIT ESELON I  
INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2021**

## PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : **INSPEKTORAT JENDERAL**

Periode Penerapan : 2021

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP=Wajar Tanpa Pengecualian)	Pengelolaan PNBPN dan BMN belum memadai
		Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan KEMENKUMHAM	Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham (Level 3 "Terdefinisi")	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif
				Penghematan/ Refocussing Anggaran karena Kebijakan pemerintah atau kebijakan Kementerian Hukum dan HAM
				Bencana alam
		Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	92% Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB (dari jumlah yang dilakukan evaluasi AKIP oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai
			92. % Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 (dari jumlah yang dilakukan evaluasi PMPRB oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai
			6 % Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (dari jumlah yang dilakukan evaluasi WBK/WBBM oleh Tim TPI ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai
			Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM (66.0)	Komponen nilai persepsi integritas yang masih rendah
			0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada Itjen telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat
			Sertifikasi ISO 37001:2016 di lingkungan Itjen	Munculnya kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut
			Pencegahan dan penanganan pademi covid-19	potensi kurang optimalnya kinerja ITJEN dikarenakan adanya apdemi covid-19

Ket : Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas sumaker

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : INSPEKTORAT JENDERAL  
 Periode Penerapan : 2021

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria (tambahan)	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP=Wajar Tanpa Pengecualian)	Pengelolaan PNPB dan BMN belum memadai	PNPB dan Aset Negara tidak dikelola dengan baik	Risiko Operasional	ITJEN	Kelemahan pengendalian intern pengelolaan PNPB dan BMN	Internal dan eksternal	C dan UC	Adanya kerugian negara dan ketidakpercayaan publik atas pengelolaan laporan keuangan Kemenkumham	Kemenkumham	Pendampingan LK, reviu LK, reviu PIPK, reviu RKAKL, reviu RKBMN, audit pengelolaan keuangan, audit barjas	PNBP dan Aset Negara tidak dikelola dengan baik
2	Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham (Level 3 "Terdefinisi")	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif	Menurunnya nilai/level maturitas SPIP kemenkumham dibawah level 3	Risiko Operasional	ITJEN	Belum melaksanakan evaluasi terpisah	Internal	C	Ketidakpercayaan publik atas akuntabilitas kinerja Kemenkumham	Kemenkumham	Evaluasi maturitas SPIP oleh Itwil I, workshop SPIP, penyusunan Perenarapan manajemen risiko	Menurunnya nilai/level maturitas SPIP kemenkumham dibawah level 3
		Penghematan/ Refocussing Anggaran karena Kebijakan pemerintah atau kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	Tidak optimalnya pelaksanaan tugas fungsi pengawasan intern ITJEN dikarenakan penghematan anggaran	Risiko Kebijakan	ITJEN	Kebijakan pemerintah tentang penghematan dan/atau realokasi antar belanja	Eksternal	UC	PKPT yang telah disusun tidak dapat berjalan sepenuhnya (berkurangnya obyek audit)	Kemenkumham	Optimalisasi anggaran hasil penghematan/refocussing	Tidak optimalnya pelaksanaan tugas fungsi pengawasan intern ITJEN dikarenakan penghematan anggaran
		Bencana alam	Bencana Alam	Risiko Operasional	ITJEN	bencana alam	Eksternal	UC	PKPT yang telah disusun tidak dapat berjalan sepenuhnya	Kemenkumham	pemanfaatan sumaker untuk data surat, email untuk data soft file, penyediaan alat pencegah bencana alam (gas pemadam, vit dan protokol kesehatan)	Bencana Alam
3	92% Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB (dari jumlah yang dilakukan evaluasi AKIP oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	Risiko Operasional	ITJEN	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan penampungan terkait penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)	Internal dan Eksternal	C	Ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenkumham	Kemenkumham	Evaluasi SAKIP, Reviu LAKP Kementerian, Workshop SAKIP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"
4	92. % Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 (dari jumlah yang dilakukan evaluasi PMPRB oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 20 (tingkat kementerian)	Risiko Operasional	ITJEN	- Kurangnya anggaran untuk melaksanakan penampungan secara langsung ke satuan kerja terkait pemenuhan LKE PMPRB, -Faktor Hasil nilainya rendah	Internal dan Eksternal	C	Ketidakpercayaan publik terhadap implementasi reformasi birokrasi Kemenkumham	Kemenkumham	Evaluasi PMPRB, workshop PMPRB	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 20 (tingkat kementerian)
5	6 % Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (dari jumlah yang dilakukan evaluasi WBK/WBBM oleh Tim TPI ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai	Turunnya citra Zona WBK/WBBM Kemenkumham dimata publik	Risiko reputasi	ITJEN	-Hasil pendampingan belum optimal mendorong satker menuju WBK/WBBM -Faktor Hasil nilainya rendah	Internal dan Eksternal	C	Kemenkumham kurang optimal membangun Zona Integritas	Kemenkumham	Evaluasi WBK/WBBM, Workshop Pembangunan ZI, APIP sebagai Tim Penilaian Internal (TPI)	Turunnya citra Zona WBK/WBBM Kemenkumham dimata publik

6	Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM (66.0)	Komponen nilai persepsi integritas yang masih rendah	Menurunnya tingkat persepsi integritas ASN maupun organisasi Kemenkumham	Risiko reputasi	ITJEN	Kurangnya Jumlah Responden internal (ASN Kemenkumham) dan eksternal (pengguna layanan) yang berpartisipasi mengikuti survei, kurangnya respon satuan kerja atas pentingnya penilaian integritas serta ada duplikasi survei yang sejenis dilakukan oleh unit eselon I lainnya	Internal dan Eksternal	UC	Adanya pegawai yang melakukan gratifikasi, suap, pungutan liar dan korupsi	Kemenkumham	-survei Penilaian mandiri persepsi Integritas (PMPI), -penilaian lapangan pelaksanaan PMPI -arahan pimpinan terkait integritas -ditetapkannya para agen perubahan -revisi tunas integritas	Menurunnya tingkat persepsi integritas ASN maupun organisasi Kemenkumham
7	0 (No) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada Itjen telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Terdapatnya conflict of interest/penyuapan pada saat perencanaan kegiatan audit	Internal dan Eksternal	C dan UC	Hasil audit yang tidak obyektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.	Kemenkumham	1.Penyusunan PKPT berdasar faktor risiko 2.revisi RKAKL oleh ITWIL I	Potensi perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar
			Potensi pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Risiko Kepatuhan	ITJEN	adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	C dan UC	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemenkumham	1.Audit investigasi dari inspektorat wilayah I 2.Adanya layanan UPG (unit pengendalian gratifikasi) 3.Adanya UPP (unit pemberantasan pungutan liar) 4. Adanya Layanan WBS	Potensi pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
8 (MR ISO SMAP)	Sertifikasi ISO 37001:2016 di lingkungan Itjen	Munculnya kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	Kemungkinan Sertifikasi di cabut/ gagal mempertahankan sertifikat ISO	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Tidak dilakukannya proses pengecekan secara periodik untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan ISO 37001:2016 dengan kondisi terkini	Internal	C	Penurunan Kredibilitas Itjen	Inspektorat Jenderal	1.Melakukan kegiatan mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 2.Audit eksternal ISO SMAP oleh lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016
9 (MR Covid)	Pencegahan dan penanganan pandemi covid-19	potensi kurang optimalnya kinerja ITJEN dikarenakan adanya apdemi covid-19	Terpaparnya ASN dan PPNPN ITJEN atas virus covid-19	Risiko Operasional terkait bencana	ITJEN	Pegawai tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan	Internal dan eksternal	C dan UC	Bertambahnya kasus covid-19 di lingkungan ITJEN	Inspektorat Jenderal	-SE Menkumham - Surat IRJEN -Nodin Ses.Itjen -Jadwal WFH -Tes Antigen / PCR -Penyemprotan desinspektan -Pemberian vitamin, masker dan handsanitizer -Pemberian sinar UV di titik ruangan	Terpaparnya ASN dan PPNPN ITJEN atas virus covid-19
			Pembiayaan anggaran covid-19 ITJEN tidak akuntabel	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Kesalahan MAK, kontrak terlambat, kwitansi tidak sah	Internal	C	Adanya temuan audit	Inspektorat Jenderal	-SE dari Ditjen Perbendaharaan tentang penggunaan MAK untuk pembiayaan covid-19 -rekon data dengan bagian keuangan Itjen -pendampingan dari auditor	Pembiayaan anggaran covid-19 ITJEN tidak akuntabel

Ket :Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas sumaker

KRITERIA RISIKO

- Risiko Kebijakan= Risiko yang disebabkan kebijakan nasional, kebijakan anggaran, dan kebijakan internal yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan
- Risiko Reputasi= Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif
- Risiko Hukum= Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum.
- Risiko Keuangan= Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja dan mengurangi nilai asset/ merugikan keuangan negara
- Risiko Operasional= Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan SOP, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
- Risiko Pelaporan= Risiko yang disebabkan oleh ketidakandalan pelaporan dalam pengambilan keputusan internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar terkait.
- Risiko Kepatuhan= Risiko yang disebabkan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**PETA RISIKO**

**Unit Pemilik Risiko = Inspektorat Jenderal**  
**Periode Penerapan = 2021**

No	Sisa Risiko	Kemungkinan			Dampak		Tingkat Risiko 7 = 4 x 6	Profil Risiko
		Uraian	alasan (tambahan)	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PNBP dan Aset Negara tidak dikelola dengan baik	Hampir Pasti	Adanya temuan BPK	4	Kementerian	5	20	Orange
2	Menurunnya nilai/level maturitas SPIP kemenkumham dibawah level 3	moderat	data dukung pengelolaan SPIP tidak terdokumentasi	3	Kementerian	5	15	Kuning
3	Tidak optimalnya pelaksanaan tugas fungsi pengawasan intern ITJEN dikarenakan penghematan anggaran	moderat	adanya pandemi covid, memungkinkan penghematan akan terjadi kembali di tahun2 berikutnya	3	Kementerian	5	15	Kuning
4	Bencana Alam	moderat	-Untuk th.2021 masih ditetapkan status pandemi covid di Indonesia dan dunia -Bencana lainnya(kebakaran, gempa, banjir, kecelakaan darat/laut/udara, pencurian dll)	3	Kementerian	5	15	Kuning
5	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	moderat	Penilaian masih dilakukan di level unit eselon I, belum ke Kanwil dan UPT	3	Kementerian	5	15	Kuning
6	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 20 (tingkat kementerian)	Hampir Pasti	Data dukung RB belum dikelola dengan baik, dan kurangnya kerjasama Tim RB	3	Kementerian	5	15	Kuning
7	Turunnya citra Zona WBK/WBBM Kemenkumham dimata publik	moderat	Adanya OTT atau temuan bersifat pungli/gratifikasi/ suap	3	Kementerian	5	15	Kuning
8	Menurunnya tingkat persepsi integritas ASN maupun organisasi Kemenkumham	moderat	berkurangnya jumlah responden internal dan eksternal, Adanya OTT atau temuan bersifat pungli/gratifikasi/ suap	3	Kementerian	5	15	Kuning
9 (PR ISO SMAP level Program)	Potensi perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar	Sangat kecil	Tidak menyusun Program kerja Audit dan kertas Kerja Audit sesuai standar	1	Kementerian	5	5	Hijau
10 (PR ISO SMAP level Program)	Potensi pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	kecil	memanipulasi laporan karena mendapatkan suap dari satker/rekanan	2	Kementerian	5	10	Biru

**Unit Pemilik Risiko = Inspektorat Jenderal**  
**Periode Penerapan = 2021**

No	Sisa Risiko	Kemungkinan			Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	alasan	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	(tambahan)	4	5	6	7 = 4 x 6	8
11 (PR ISO SMAP level Program)	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016	kecil	Tidak melaksanakan tahapan Klausul ISO SMAP	2	ITJEN	4	8	Biru
12 (MR Covid)	Terpaparnya ASN dan PPNPN ITJEN atas virus covid-19	Pasti terjadi	Sudah banyak pegawai Itjen yang meninggal dan terpapar covid-19, dapat dilihat pada <a href="https://covid19.kemenumham.go.id/">https://covid19.kemenumham.go.id/</a>	5	Kementerian	5	25	Merah
12 (MR Covid)	Pembiayaan anggaran covid-19 ITJEN tidak akuntabel	Moderat	Pendampingan APIP saat revisi	3	Kementerian	5	15	Kuning

Ket : Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas sumaker

**KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO**

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

**KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO**

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional	3
4	Unit Eselon I	Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan	5

Untuk perbaikan level risiko 1 sd 25. lebih lihat dampaknya, semakin berdampak maka level nya makin tinggi bukan hanya  $1*5=5$

Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko):

Matriks Analisis Risiko 5x5			DAMPAK																												
			1 PEGAWAI	2 SATKER/UNIT	3 KANWIL/ESKEL	4 UNIT UTAMA	5 KEMENTERIAN																								
KEMUNGKINAN	5	PASTI	5	10	15	20	25																								
	4	HAMPIR PASTI	4	8	12	16	20																								
	3	MODERAT	3	6	9	12	15																								
	2	KECIL	2	4	6	8	10																								
	1	SANGAT KECIL	1	2	3	4	5																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Warna</th> <th>Level</th> <th>Level dimulaidari Status Risiko</th> <th>Deskripsi Status Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Merah</td> <td>5</td> <td>21</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Oranye</td> <td>4</td> <td>16</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Kuning</td> <td>3</td> <td>11</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>Biru</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>Hijau</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Sangat Rendah</td> </tr> </tbody> </table>								Warna	Level	Level dimulaidari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko	Merah	5	21	Sangat Tinggi	Oranye	4	16	Tinggi	Kuning	3	11	Sedang	Biru	2	6	Rendah	Hijau	1	1	Sangat Rendah
Warna	Level	Level dimulaidari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko																												
Merah	5	21	Sangat Tinggi																												
Oranye	4	16	Tinggi																												
Kuning	3	11	Sedang																												
Biru	2	6	Rendah																												
Hijau	1	1	Sangat Rendah																												

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko = **INSPEKTORAT JENDERAL**

Periode Penerapan= 2021

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikator	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	PNBP dan Aset Negara tidak dikelola dengan baik	20	2	15 (mengurangi kemungkinan)	Persentase minimal temuan material atas Laporan keuangan Kemenkumham, dibawah 5%	4.5%
2	Menurunnya nilai/level maturitas SPIP kemenkumham dibawah level 3	15	6	10 (mengurangi kemungkinan)	Persentase rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	5.0%
3	Tidak optimalnya pelaksanaan tugas fungsi pengawasan intern ITJEN dikarenakan penghematan anggaran	15	7	10 (mengurangi kemungkinan)	Penurunan kinerja Kemenkumham (opini LK, indeks RB, indeks SAKIP, indeks integritas, wbk/wbbm)	Nilai Baik (B)
4	Bencana Alam	15	9	12 (mengurangi dampak)	Persentase keselamatan pegawai Itjen	98.0%
5	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	15	4	10 (mengurangi kemungkinan)	Persentase rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	5.0%
6	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 20 (tingkat kementerian)	15	5	15 (mengurangi kemungkinan)	Persentase rekomendasi evaluasi reformasi birokrasi Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	5.0%
7	Turunnya citra Zona WBK/WBBM Kemenkumham dimata publik	15	3	10 (mengurangi kemungkinan)	Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	10%
8	Menurunnya tingkat persepsi integritas ASN maupun organisasi Kemenkumham	15	8	10 (mengurangi kemungkinan)	Indeks persepsi integritas Kemenkumham, minimal di atas hasil penilaian awal PMPI Th.2019	87.65
9 (PR ISO SMAP level Program)	Potensi perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar	5	13	4 (mengurangi dampak)	Jumlah aduan conflict of interest/penyuapan pada proses perencanaan kegiatan audit, yang terbukti	0
10 (PR ISO SMAP level Program)	Potensi pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	10	11	5 (mengurangi kemungkinan)	Jumlah laporan pegawai Itjen yang menerima gratifikasi/penyuapan yang terbukti	0
11 (PR ISO SMAP level Program)	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016	8	12	4 (mengurangi kemungkinan)	Tidak dapat mempertahankan / dicabutnya sertifikasi ISO	0
12 (MR Covid)	Terpaparnya ASN dan PPNPN ITJEN atas virus covid-19	25	1	20 (mengurangi kemungkinan)	Persentase pegawai dan PPNPN Itjen yang terpapar covid	0
				20 (mengurangi kemungkinan)	Persentase pegawai dan PPNPN Itjen mengisi data pada aplikasi self assessment pencegahan covid Itjen	98%
12 (MR Covid)	Pembiayaan anggaran covid-19 ITJEN tidak akuntabel	15	10	5 (mengurangi kemungkinan)	Persentase temuan audit terkait pembiayaan anggaran covid itjen dari total pagu anggaran covid itjen	0

Ket :Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas sumaker

**RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO**

Unit Pemilik Risiko = INSPEKTORAT JENDERAL

Periode Penerapan= 2021

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase minimal temuan material atas Laporan keuangan Kemenkumham, dibawah 5%	5%	Mengurangi Risiko	Reviu PIPK, reviu Revaluasi BMN	Laporan reviu PIPK dan Laporan revaluasi BMN	1	Desember	Inspektorat Wilayah	-
2	Persentase rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	5%	Mengurangi Risiko	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham	Laporan monitoring maturitas SPIP	1	April	Inspektorat Wilayah	-
3	Penurunan kinerja Kemenkumham (opini LK, indeks RB, indeks SAKIP, indeks integritas, wbk/wbbm)	Nilai Baik (B)	Mengurangi Risiko	Peningkatan kompetensi APIP	Laporan peningkatan kompetensi	1	Desember	Sekretaris ITJEN	-
4	Persentase keselamatan pegawai Itjen	98%	Mengurangi dampak	Pencegahan dan pengurangan bencana	Laporan Pencegahan dan pengurangan bencana	1	Desember	Sekretaris ITJEN	-
5	Persentase rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	5%	Mengurangi Risiko	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian SAKIP Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian SAKIP	1	Juli	Inspektorat Wilayah	-
6	Persentase rekomendasi evaluasi reformasi birokrasi Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	5%	Mengurangi Risiko	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian reformasi birokrasi Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian RB	1	Juli	Inspektorat Wilayah	-
7	Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	0	Mengurangi Risiko	Melaksanakan Des audit terhadap 884 satuan kerja	Laporan Desk Audit WBK/WBBM	1	April-Mei	Inspektorat Wilayah	-
8	Indeks persepsi integritas Kemenkumham, minimal di atas hasil penilaian awal PMPI Th.2019	87.65	Mengurangi Risiko	Melaksanakan penilaian PMPI Th.2020	Laporan Penilaian PMPI Th.2020	1	Agustus	Tim PMPI ITJEN	-
				Koordinasi dengan KPK atas hasil SPI dan dengan Balitbang atas hasil survey QR code terkait integritas	informasi koordinasi dengan KPK dan QR code balitbang	1	September		
9 (PR ISO SMAP level Program)	Jumlah aduan conflict of interest/penyuapan pada proses perencanaan kegiatan audit, yang terbukti	0	Mengurangi risiko	Monitoring aduan secara berkala	Laporan pengaduan berkala	1	Oktober	ITJEN	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 (PR ISO SMAP level Program)	Jumlah laporan pegawai Itjen yang menerima gratifikasi/penyuapan yang terbukti	0	Mengurangi risiko	Sosialisasi gratifikasi dan monitoring pelaporan gratifikasi	Laporan Sosialisasi dan monev gratifikasi	1	Oktober	ITJEN	-
11 (PR ISO SMAP level Program)	Tidak dapat mempertahankan / dicabutnya sertifikasi ISO	0	Mengurangi risiko	Audit eksternal oleh lembaga sertifikasi ISO SMAP	Sertifikasi ISO SMAP	1	Oktober	ITJEN	-
12 (MR Covid)	Persentase pegawai dan PPNPN Itjen yang terpapar covid	0	Mengurangi kemungkinan	Meningkatkan tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan	Data peg ITJEN dan PPNPN terpapar covis (suspect, probabel, kontak erat, konfirmasi, sembuh, meninggal)	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (kepeg)	-
	Persentase pegawai dan PPNPN Itjen mengisi data pada aplikasi self assessment pencegahan covid Itjen	98%	Mengurangi kemungkinan	Surat Peringatan dan Himbauan mengisi assessment covid-19	Rekapitulasi asesment covid per bulan, dilingkungan ITJEN	12	Per bulan	Sekretaris ITJEN (kepeg)	-
13 (MR Covid)	Persentase temuan audit terkait pembiayaan anggaran covid itjen dari total pagu anggaran covid itjen	0	Mengurangi kemungkinan	Mengurangi Kesalahan MAK, kontrak terlambat, kwitansi tidak sah	jumlah temuan kesalahan penggunaan MAK covid	0	Dec 20	Sekretaris ITJEN (Bagian	-

Ket :Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas sumaker

**PEMANTAUAN RISIKO**

Unit Pemilik Risiko = INSPEKTORAT JENDERAL  
 Periode Penerapan= 2021

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11= kolom 10 indikator risk x kolom 5 toleransi	12
1	Reviu PIPK, reviu Revaluasi BMN	Laporan reviu PIPK dan Laporan revaluasi BMN	1			Persentase minimal temuan material atas Laporan keuangan Kemenkumham, dibawah 5%	5%				
2	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham	Laporan monitoring maturitas SPIP	1			Persentase rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	5%				
3	Peningkatan kompetensi APIP	Laporan peningkatan kompetensi	1			Penurunan kinerja Kemenkumham (opini LK, indeks RB, indeks SAKIP, indeks integritas, wbk/wbbm)	Nilai Baik (B)				
4	Pencegahan dan pengurangan bencana	Laporan Pencegahan dan pengurangan bencana	1			Persentase keselamatan pegawai ltjen	98%				
5	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian SAKIP Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian SAKIP	1			Persentase rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	5%				
6	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian reformasi birokrasi Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian RB	1			Persentase rekomendasi evaluasi reformasi birokrasi Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	5%				
7	Melaksanakan Des audit terhadap 884 satuan kerja	Laporan Desk Audit WBK/WBBM	1			Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	200				
8	Melaksanakan penilaian PMPI Th.2020	Laporan Penilaian PMPI Th.2020	1			Indeks persepsi integritas Kemenkumham, minimal di atas hasil penilaian awal PMPI Th.2019	87.65				

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11= kolom 10 indikator risk x kolom 5 toleransi	12
	Koordinasi dengan KPK atas hasil SPI dan dengan Balitbang atas hasil survey QR code terkait integritas	informasi koordinasi dengan KPK dan QR code balitbang	1								
9 (PR ISO SMAP level Program)	Monitoring aduan secara berkala	Laporan pengaduan berkala	1			Jumlah aduan conflict of interest/penyuapan pada proses perencanaan kegiatan audit, yang terbukti	0				
10 (PR ISO SMAP level Program)	Sosialisasi gratifikasi dan monitoring pelaporan gratifikasi	Laporan Sosialisasi dan monev gratifikasi	1			Jumlah laporan pegawai Itjen yang menerima gratifikasi/penyuapan yang terbukti	0				
11 (PR ISO SMAP level Program)	Audit eksternal oleh lembaga sertifikasi ISO SMAP	Sertifikasi ISO SMAP	1			Tidak dapat mempertahankan / dicabutnya sertifikasi ISO	0				
12 (MR Covid)	Meningkatkan tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan	Data peg ITJEN dan PPNPN terpapar covis (suspect, probabel, kontak erat, konfirmasi,	4			Persentase pegawai dan PPNPN Itjen yang terpapar covid	0				
	Surat Peringatan dan Himbauan mengisis assessment covid-19	Rekapitulasi asesment covid per bulan, dilingkungan ITJEN	12			Persentase pegawai dan PPNPN Itjen mengisi data pada aplikasi self assessment pencegahan covid Itjen	98%				
13 (MR Covid)	Mengurangi Kesalahan MAK, kontrak terlambat, kwitansi tidak sah	jumlah temuan kesalahan penggunaan MAK covid	0			Persentase temuan audit terkait pembiayaan anggaran covid itjen dari total pagu anggaran covid itjen	0				

Ket :Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas sumaker

**MANAJEMEN RISIKO  
TINGKAT PROGRAM / UNIT ESELON II  
INSPEKTORAT WILAYAH  
TAHUN 2021**

## PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah

Periode Penerapan : Tahun 2021

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham (level 3 menuju 4)	PKPT belum berbasis risiko, saat ini PKPT berdasar faktor risiko
2			Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham (level 3 menuju 4)	IACM level 4 belum tercapai
3		Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja (52%)	Belum seluruh satuan kerja menerapkan Manajemen Risiko
4		dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja (52%)	Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan
5			Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara/pengembalian ke kas negara (minimal 62%) dan terkait administrasi (minimal 82%)	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP terkait temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi
6			Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara (minimal 22%) dan terkait Administrasi (minimal 78%)	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait temuan Kerugian negara dan administrasi
7			Persentase satuan kerja dilingkungan ITWIL I, II, III, IV, V dan VI yang memperoleh predikat WBK/WBBM (6% per ITWIL)	Pemenuhan data dukung komponen pengungkit dan survei komponen hasil belum memadai
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan			0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada Itjen telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan			Sertifikasi ISO 37001:2016 di lingkungan Itjen	Munculnya kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi

Ket :Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas sumaker

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah  
 Periode Penerapan : Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria (tambahan)	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham (level 3 menuju 4)	PKPT belum berbasis risiko, saat ini PKPT berdasar faktor risiko	Potensi Risiko audit yang tinggi kurang teridentifikasi dan terdokumentasi	Risiko Reputasi	Inspektorat Wilayah	Manajemen risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh	eksternal	C dan UC	Menurunnya citra APIP dimata satuan kerja dan menurunnya level maturitas SPIP (IKU ITJEN)	Kemenkumham	Peningkatan kompetensi dan sarana prasarana APIP	Potensi Risiko audit yang tinggi kurang teridentifikasi dan terdokumentasi
2	sda	IACM level 4 belum tercapai	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)	Risiko Kepatuhan	Inspektorat Wilayah	- Sumber daya belum memadai - Administrasi tidak tertib - Belum adanya regulasi yang mendukung - Ketidaktahuan terhadap mekanisme penilaian.	Internal	C	penurunan reputasi dan penurunan kinerja	Kemenkumham	Self assessment yang dilakukan oleh intern Itjen	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)
3	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja (52%)	Belum seluruh satuan kerja menerapkan Manajemen Risiko	potensi Rendahnya tingkat penerapan maturitas Manajemen Risiko	Risiko Operasional	Inspektorat Wilayah	Belum seluruh satuan kerja memahami bagaimana cara menyusun penerapan manajemen risiko	Internal	C	dapat mempe ngaruhi tingat maturitas SPIP	Kemenkumham	pendampingan penyusunan manajemen risiko satuan kerja	potensi Rendahnya tingkat penerapan maturitas Manajemen Risiko
4	(MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	Risiko Reputasi Risiko Kepatuhan	Inspektorat Wilayah	- Kurangnya informasi yang diperoleh auditor dan komunikasi dengan stakeholder; - Kurangnya kompetensi auditor; - Kurang tepatnya penerapan manajemen risiko satuan kerja	Internal	C	terjadi operasi tangkap tangan maupun kerugian negara	Kemenkumham	Audit Barjas, Audit kinerja tugas dan fungsi audit pengelolaan keuangan negara, audit sertijab	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria (tambahan)	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
5 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara/pengembalian ke kas negara (minimal 62%) dan terkait administrasi (minimal 82%)	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP terkait temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi	Temuan berulang	Risiko Keuangan dan Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN dan Inspektorat Wilayah	-Adanya temuan APIP yang berulang yang sifatnya administrasi, sehingga satker enggan menindaklanjuti -adanya pergantian Kepala Satker sehingga tidak mengetahui adanya temuan dimaksudkan adanya temuan berulang	Internal dan Eksternal	C dan UC	Temuan hasil pengawasan itjen terus bertambah, dimungkinkan satker tidak bisa ikut ajang WBK/WBBM	Kemenkumham	Rekosiliasi tindaklanjut temuan APIP secara berkala	Temuan berulang
6 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara (minimal 22%) dan terkait Administrasi (minimal 78%)	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait temuan Kerugian negara dan administrasi	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	Risiko Keuangan dan Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN dan Inspektorat Wilayah	-Adanya temuan BPK terkait kerugian negara yang dilakukan oleh pihak ketiga yang sulit ditindaklanjuti -adanya temuan tahun yang telah lama namun belum ada kesepakatan antara ITJEN dengan BPK tentang prosesnya -Perbedaan data SIPTL dengan database ITJEN	Internal dan Eksternal	C dan UC	Meurunnya kinerja ITJEN dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan terkait kerugian negara	Kemenkumham	Rekosiliasi tindaklanjut temuan pemeriksaan BPK secara berkala melalui mekanisme SPITL	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak
7 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Presentase satuan kerja di lingkungan ITWIL I, II, III, IV, V dan VI yang memperoleh predikat WBK/WBBM (6% per ITWIL)	Pemenuhan data dukung komponen pengungkit dan survei komponen hasil belum memadai	rata -rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	Risiko Operasional	Inspektorat Wilayah	Satuan kerja yang diusulkan belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan	Internal	C	Satker yang diusulkan belum memperoleh predikat WBK/WBBM	Kemenkumham	-workshop pembangunan ZI -Pencanangan ZI -disusunnya Permenkumha no.6 th 2020 tentang perubahan permenkumham nno 29 th 2019 tentang pembangunan Zona Integritas -Disusunnya assecor	rata -rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	0 (No) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada Itjen telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap pada saat penyusunan Program audit	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Kurangnya integritas Auditor	Internal	C	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemenkumham	Penandatanganan Pakta Integritas, Adanya SOP penyusunan Program Audit	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Kurangnya Pengawasan Berjenjang	Internal	C	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemenkumham	Penandatanganan Pakta Integritas, Adanya SOP penyusunan Program Audit	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Kurangnya Pemahaman Satker Terhadap Kebijakan Anti Suap di Inspektorat Jenderal	Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Kemenkumham	Kemenkumham	Sosialisasi Penanganan Gratifikasi dan Pungutan Liar	-

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria (tambahan)	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
	sda	sda	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, revidu, evaluasi, was lainnya)	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Kurangnya integritas Auditor dalam melaksanakan tugas	Internal dan Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemenkumham	Internalisasi AAPI Nomor KEP-063/AAPI/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAPI nomor S-01/AAPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, revidu, evaluasi, was lainnya)
	sda	sda	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	UC	Hasil Audit yang tidak objektif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan	Kemenkumham	Internalisasi AAPI Nomor KEP-063/AAPI/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAPI nomor S-01/AAPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan
	sda	sda	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	UC	Penjatuhan Hukuman disiplin yang tidak objektif	Kemenkumham	Penerapan PP No. 53 Tahun 2010, Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010, Permenkumham No. 28 Tahun 2019, UU ASN No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 17 Tahun 2020, Perka BKN No. 3 Tahun 2020, SOP	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan
	sda	sda	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Kurangnya integritas Auditor dalam melaksanakan tugas	Internal dan Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemenkumham	Internalisasi AAPI Nomor KEP-063/AAPI/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAPI nomor S-01/AAPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Sertifikasi ISO 37001:2016 di lingkungan Itjen	Munculnya kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016	Risiko Reputasi	ITJEN	Tidak dilakukannya proses pengecekan secara periodik untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan ISO 37001:2016 dengan kondisi terkini	Internal	C	Penurunan kredibilitas ITJEN	Kemenkumham	a. melakukan proses pendampingan dengan tenaga ahli konsultan pendampingan dan sertifikasi ISO 37001:2016 (pihak ke 3) b. Melakukan kegiatan persiapan audit ISO 37001:2016	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016

Ket :Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas

#### KRITERIA RISIKO

Risiko Kebijakan=	Risiko yang disebabkan kebijakan nasional, kebijakan anggaran, dan kebijakan internal yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan
Risiko Reputasi=	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif
Risiko Hukum=	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum.
Risiko Keuangan=	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja dan mengurangi nilai asset/ merugikan keuangan negara.
Risiko Operasional=	Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan SOP, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
Risiko Pelaporan=	Risiko yang disebabkan oleh ketidakandalan pelaporan dalam pengambilan keputusan internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar terkait.
Risiko Kepatuhan=	Risiko yang disebabkan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor : ITJ-04.OT.03 Tahun 2021

Tanggal : 3 Maret 2021

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

## PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah  
Periode Penerapan : Tahun 2021

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Potensi Risiko audit yang tinggi kurang teridentifikasi dan terdokumentasi	moderat	3	Kemenkum ham	5	15	Kuning / sedang
2	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIP)	Hampir Pasti	4	Inspektorat Jenderal	4	16	Orange/ Tinggi
3	potensi Rendahnya tingkat penerapan maturitas Manajemen Risiko	moderat	3	Kemenkum ham	5	15	Kuning / Sedang
4 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	Pasti	5	Kemenkum ham	5	25	Merah / Sangat tinggi
5	Temuan berulang	Pasti	5	Kemenkum ham	5	25	Merah / Sangat tinggi
6	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	Pasti	5	Kemenkum ham	5	25	Merah / Sangat tinggi
7	rata -rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	Hampir Pasti	4	Kemenkum ham	5	20	Orange/ Tinggi
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
10 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
11 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
12 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning

Ket :Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas sumaker

**KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO**

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

**KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO**

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional	3
4	Unit Eselon I	Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan	5

21-25            merah  
16-20            orange  
11-15            kuning  
6-10             biru  
1-5                hujau

Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko):

Matriks Analisis Risiko 5x5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			PEGAWAI	SATKER/UNIT	KANWIL/ESKLO	UNIT UTAMA	KEMENTERIAN
KEMUNGKINAN	5	PASTI	5	10	15	20	25
	4	HAMPIR PASTI	4	8	12	16	20
	3	MODERAT	3	6	9	12	15
	2	KECIL	2	4	6	8	10
	1	SANGAT KECIL	1	2	3	4	5
Warna		Level	Level dimulaidari	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko		
Merah		5	21	Sangat Tinggi			
Oranye		4	16	Tinggi			
Kuning		3	11	Sedang			
Biru		2	6	Rendah			
Hijau		1	1	Sangat Rendah			

**INDIKATOR RISIKO**

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah

Periode Penerapan : Tahun 2021

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Potensi Risiko audit yang tinggi kurang teridentifikasi dan terdokumentasi	15	10	10 (mengurangi kemungkinan)	Persentase penyusunan PKPT berbasis risiko yang belum memanfaatkan data penerapan manajemen risiko satuan kerja	50%
2	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	16	5	12 (mengurangi kemungkinan)	Persentase rekomendasi penilaian IACM yang BELUM selesai ditindaklanjuti	2%
3	potensi Rendahnya tingkat penerapan maturitas Manajemen Risiko	15	11	10 (mengurangi kemungkinan)	Persentase satuan kerja yang belum menerapkan manajemen risiko	50%
4	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	25	1	20 (mengurangi kemungkinan)	Persentase APIP yang belum memperoleh pengembangan kompetensi terkait fraud dan kerugian negara dalam 2 tahun terakhir	50%
5	Temuan berulang	25	3	20 (mengurangi kemungkinan)	Persentase temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti	40%
6	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	25	2	20 (mengurangi kemungkinan)	Persentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%
7	rata-rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	20	4	15 (mengurangi kemungkinan)	Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	50%
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)	15	6	10 (mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyuaipan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	15	8	10 (mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	0
10 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan	15	7	10 (mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan .	0
11 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	15	9	10 (mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0
12 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Tidak terpenuhinya klausul sesuai standar ISO 37001:2016	15	12	10 (mengurangi kemungkinan)	Jumlah laporan auditor yang terbukti menerima gratifikasi untuk kepentingan pribadi dan golongan	0

Ket :Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas sumaker

## RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah

Periode Penerapan : Tahun 2021

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presentase penyusunan PKPT berbasis risiko yang belum memanfaatkan data penerapan manajemen risiko satuan kerja	50%	Mengurangi Risiko	Penyusunan PKPT berbasis risiko berdasar pada peta risiko satuan kerja	PKPT berbasis risiko	1	November	Inspektorat wilayah	-
2	Persentase rekomendasi penilaian IACM yang BELUM selesai ditindaklanjuti	2%	Mengurangi Risiko	Evaluasi hambatan dalam menindaklanjuti rekomendasi IACM	Laporan evaluasi	1	Agustus	Inspektorat wilayah	-
3	Persentase satuan kerja yang belum menerapkan manajemen risiko	50%	Mengurangi Risiko	Evaluasi/reviu atas penerapan manajemen risiko pada satuan kerja	Laporan evaluasi	1	Spetember	Inspektorat wilayah	-
4	Persentase APIP yang belum memperoleh pengembangan kompetensi terkait fraud dan kerugian negara dalam 2 tahun terakhir	50%	Mengurangi Risiko	Jumlah kegiatan diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko	Laporan Diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko	1	Desember	Inspektorat wilayah	-
5	Presentase temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti	40%	Mengurangi Risiko	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pengawasan APIP	Laporan rekonsiliasi	4	Triwulan	Inspektorat wilayah dan Sekretariat Itjen	-
6	Presentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%	Mengurangi Risiko	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Laporan rekonsiliasi	4	Triwulan	Inspektorat wilayah dan Sekretariat Itjen	-
7	Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	40%	Mengurangi Risiko	TPI Melaksanakan desk audit atas satuan kerja yang berpotensi dapat diusulkan WB/WBBM	Laporan hasil Desk Audit TPI	1	Juni	Inspektorat Wilayah (Tim TPI)	-
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyuapan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0	Mengurangi Risiko	Melakukan sosialisasi/internalisasi/bimbingan tentang kebijakan anti suap (ISO SMAP) kepada pegawai ITJEN	laporan Sosialisasi/internalisasi/notula tentang giat anti suap	1	Desember	Inspektorat Wilayah	-
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	0	Mengurangi Risiko	melakukan reviu berjenjang secara mendalam terkait Laporan Hasil Pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan Pengaawasan lainnya)	Dokumen reviu berjenjang atas LHP	12	Januari sd Desember	Inspektorat Wilayah	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan .	0	Mengurangi Risiko	Melakukan rewiu berjenjang atas usulan hukdis pegawai	Dokumen rewiu berjenjang atas usulan hukdis	1	Desember	Inspektorat Wilayah	-
11 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0	Mengurangi Risiko	Melakukan rewiu berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	Dokumen berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	1	Desember	Inspektorat Wilayah	-
12 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Jumlah laporan auditor yang terbukti menerima gratifikasi untuk kepentingan pribadi dan golongan	0	Mengurangi Risiko	melakukan Evaluasi kebijakan penanganan Gratifikasi dan sosialisasi/internalisasi kebijakan anti suap (ISO SMAP)	Laporan Evaluasi kebijakan penanganan Gratifikasi, laporan Sosialisasi/internalisasi ISO SMAP	2	Maret	Inspektorat Wilayah	-

Ket :Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas sumaker

## PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Wilayah

Periode Penerapan : Tahun 2021

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11= kolom 10 indikator risk x kolom 5 toleransi	12
1	Penyusunan PKPT berbasis risiko berdasar pada peta risiko satuan kerja	PKPT berbasis risiko	1			Presentase penyusunan PKPT berbasis risiko yang belum memanfaatkan data penerapan manajemen risiko satuan kerja	50%				
2	Evaluasi hambatan dalam menindaklanjuti rekomendasi IACM	Laporan evaluasi	1			Persentase rekomendasi penilaian IACM yang BELUM selesai ditindaklanjuti	2%				
3	Evaluasi/reviu atas penerapan manajemen risiko pada satuan kerja	Laporan evaluasi	1			Persentase satuan kerja yang belum menerapkan manajemen risiko	50%				
4	Jumlah kegiatan diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko	Laporan Diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko	1			Persentase APiP yang belum memperoleh pengembangan kompetensi terkait fraud dan kerugian negara dalam 2 tahun terakhir	50%				
5	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pengawasan APiP	Laporan rekonsiliasi	4			Presentase temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti	40%				
6	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Laporan rekonsiliasi	4			Presentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%				
7	TPI Melaksanakan desk audit atas satuan kerja yang berpotensi dapat diusulkan WB/WBBM	Laporan hasil Desk Audit TPI	1			Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	40%				
8 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Melakukan sosialisasi/ internalisasi/bimbingan tentang kebijakan anti suap (ISO SMAP) kepada pegawai ITJEN	laporan Sosialisasi/internalisasi/ notula tentang giat	1			Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyuaipan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0				
9 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	melakukan reviu berjenjang secara mendalam terkait Laporan Hasil Pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan Pengawasan lainnya)	Dokumen reviu berjenjang atas LHP	12			Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	0				
10 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Melakukan reviu berjenjang atas usulan hukdis pegawai	Dokumen reviu berjenjang atas usulan hukdis	1			Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disiplin untuk kepentingan pribadi atau golongan	0				
11 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	Melakukan reviu berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	Dokumen berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	1			Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0				
12 (MR ISO SMAP Level Kegiatan ITWIL)	melakukan Evaluasi kebijakan penanganan Gratifikasi dan sosialisasi/internalisasi kebijakan anti suap (ISO SMAP)	Laporan Evaluasi kebijakan penanganan Gratifikasi, laporan Sosialisasi/internalisa	2			Jumlah laporan auditor yang terbukti menerima gratifikasi untuk kepentingan pribadi dan golongan	0				

Ket :Hasil pembahasan dengan auditor dan sekretariat tanggal 4 februari 2021 serta masukan dari ITWIL dan Bagian melalui nota dinas

**KONSEP  
MANAJEMEN RISIKO  
TINGKAT PROGRAM / UNIT ESELON II  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2021**

## PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Inspektorat Jenderal

Periode Penerapan : 20201

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi / pungutan liar (	Jumlah Rekomendasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	Belum optimalnya pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)
2	sda	Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN (Target 14.7)	Pelaksanaan RB ITJEN belum terdokumentasi dengan baik
	sda	sda	Nilai SAKIP ITJEN "Baik" (Target 82,88)	Penyusunan LKIP dan laporan berkala kurang Akuntabel dan kurang tepat waktu
	sda	sda	sda	Ketidaksesuaian data RENJA dengan RKAKL
	sda	sda	sda	Indikator kinerja tidak berbasis outcome
	sda	sda	sda	LAKIN tidak sesuai dengan RENSTRA
	sda	sda	Nilai Maturitas SPIP ITJEN (level 4-terkelola dan terukur)	Pendokumentasian Pelaksanaan implementasi SPIP belum optimal di laksanakan
				Manajemen Risiko ITJEN hanya sebagai pemenuhan dokumen
3	sda	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi (82.%)	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN
				Layanan kepegawaian belum optimal
	sda	sda	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham (Tingkat 3)	Tata nilai Kemenkumham belum optimal ditanamkan pada setiap ASN
4	sda	Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal (82%)	Perencanaan Sistem Informasi pengawasan belum memiliki grand design
5	sda	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel (85%)	Manajemen aset yang belum optimal
		sda	sda	Keterlambatan pemrosesan surat masuk melalui SISUMAKER
		sda	sda	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif
		sda	sda	Inventarisasi BMN tidak update
		sda	sda	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal
		sda	sda	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
	sda	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Laporan keuangan ITJEN tidak akuntabel
		sda	sda	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL
		sda	sda	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Itjen
		sda	sda	Data SAIBA dan BMN tidak sinkron
	sda	sda	sda	Pembayaran tagihan pihak ketiga/penyedia belum tepat waktu
				Salah saji dalam menyusun laporan realisasi belanja pegawai
		sda	sda	Masih terdapat Bendahara belum memiliki kompetensi yang memadai
		sda	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (90%)	UP (uang persediaan) tidak cukup tersedia sesuai dengan kebutuhan dalam RAB dan KAK pelaksanaan kegiatan
		sda	sda	Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar
6 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	sda	Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memfasilitasi peningkatan nilai RB, nilai SAKIP, nilai maturitas SPIP ITJEN	Kurang optimalnya peran POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN yang telah ditetapkan
			0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memberikan penilaian pada target kinerja ITJEN yang diturunkan ke Kantor Wilayah	Penilaian Target Kinerja Kantor Wilayah yang tidak tepat
			0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memberikan anggaran per jenis belanja dan per kegiatan per ITWIL dan Bagian	Pagu belanja non operasional masih dalam bentuk total bukan per kegiatan
		Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional (LG-2)	0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memfasilitasi pengelolaan kepegawaian ITJEN (mutasi, promosi, kenaikan pangkat dan pengelolaan	Terdapat keterlambatan dalam memberikan layanan kepegawaian
		Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam pengadaan barang/jasa	Panitia / Pokja pengadaan belum optimal memahami proses pengadaan
		Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan keuangan	Terjadinya benturan kepentingan dalam pecepatan pemberian anggaran kegiatan
		Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan Teknologi Informasi	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan
			0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam mengelola database temuan Pengawasan dan Pemeriksaan	Perbedaan data temuan
			0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam mengelola database Hukuman Disiplin pegawai	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela
			0 (nol) kasus penyuaapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan pengelolaan pengaduan, wbs dan	Layanan SIPUDU belum optimal

Ket :Hasil pembahasan dengan perwakilan sekretariat dan auditor tanggal 4 Februari 2021 serta masukan /saran dari ITWIL dan bagian melalui Nota Dinas Sumaker

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Inspektorat Jenderal  
 Periode Penerapan : Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
1	Jumlah Rekomendasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	Belum optimalnya pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	Resiko Operasional	Tim Saber Pungli ITJEN	Kegiatan UPP belum terencana	Internal	C	-Terjadinya pungutan liar -Adanya OTT pegawai kemenkumham	Kemenkumham	UPP menjadi level output dalam postur anggaran	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan
2	Indeks RB ITJEN (Target 14.7)	Pelaksanaan RB ITJEN belum terdokumentasi dengan baik	Pelaksanaan RB ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Kurangnya komitmen seluruh pegawai ITJEN dalam mengimplementasikan RB	Internal	C	Implementasi pelaksanaan RB ITJEN tidak optimal menunjang implementasi pelaksanaan Rb kemenkumham	Inspektorat Jenderal	Workshop dan PKS PMPRB, Pembentukan SK Tim RB ,, pelaksanaan penguatan RB melalui mekanisme rapat, pembentukan agen perubahan	Pelaksanaan RB ITJEN diragukan akuntabilitasnya
						Tim RB yang ditetapkan dengan SK Irjen kurang bekerja sesuai uraian tugas da tidak tepat waktu	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Koordinasi pelaksanaan tugas Tim RB dengan Bagian PHP	
3	Nilai SAKIP ITJEN "Baik" (Target 82,88)	Penyusunan LKIP dan laporan berkala kurang Akuntabel dan kurang tepat waktu	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Penyusun LAKIN ITJEN belum mengikuti diklat penyusunan LAKIN	Internal	C	Penyajian SAKIP dalam LAKIN ITJEN belum menggambarkan kinerja ITJEN	Inspektorat Jenderal	Mengikuti workshop evaluasi SAKIP	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya
	sda	sda	sda	sda	sda	hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai data punish and reward	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Menyusun indikator kinerja level eselon 1 sd level eselon IV dan JFA	
	sda	sda	sda	sda	sda	Belum disusun LAKIN per unit eselon II ITJEN	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Mengintensifikasikan koordinasi dengan Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian guna mempercepat penyelesaian laporan kinerja	
	sda	sda	sda	sda	sda	Anggaran dalam RKAL banyak dilakukan revisi anggaran (lebih dari lima kali revisi)	Internal	C	RKAL kurang efektif efektif , sehingga sering kali melakukan revisi DIPAAnggaran pada tahun	Inspektorat Jenderal	Menyusun kebutuhan anggaran di Des TA berjalan untuk untuk TA. X+1	

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab	Sumber	C/ UC	Dampak	Pihak yang Terkena	Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				sda				berjalan		Menyusun postur anggaran TA.X+1 untuk memudahkan dalam perencanaan kinerja		
				sda						Men kunci usulan kegiatan yang tertuang dalam RKAKL saat periode pagu anggaran		
	sda	sda	sda	sda	sda	Program kerja yang telah tersusun dalam PKPT, dalam pelaksanaan kegiatannya masih berubah tidak sesuai dengan PKPT terutama kegiatan untuk pemenuhan target IKU dan IKK	Internal	C	Jadwal pelaksanaan program pengawasan tidak sesuai dengan Kalender Kerja dan Disbursement Plan yang telah ditetapkan, mengakibatkan Bagian Keuangan kesulitan dalam menyediakan penganggarnya	Inspektorat Jenderal	Mengintensifkan koordinasi dengan Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian di lingkungan Itjen perihal pelaksanaan program kerja agar memperhatikan kegiatan yang telah tersusun dalam PKPT dan bila ada perubahan agar memperhatikan target yang telah ditentukan sebelumnya	
4	sda	Ketidaksesuaian data RENJA dengan RKAKL	Salah menetapkan Perjanjian Kinerja	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	RENJA disusun diawal tahun, tidak diupdate diperiode pagu anggaran dan alokasi anggaran	Internal / Eksternal	C / UC	Salah menetapkan target dan besaran anggaran dalam Perjanjian Kinerja, yang seharusnya data antara RENJA, RKA-K/L dan Perjanjian Kinerja adalah sama, sehingga akan berdampak pada saat penyusunan evaluasi kinerja program maupun kegiatan	Inspektorat Jenderal	-Mengintensifkan koordinasi dengan Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian bahwa data yang tertuang dalam RENJA, dipedomani sebagai dasar penyusunan RKA-K/L. -Mengupdate aplikasi RKAKL pada aplikasi satudja.kemenkeu.go.id -mengupdate data GPP gaji dari Bagian keuangan dalam aplikasi RKAKL pada setiap periode penyusunan pagu -mengupdate data pegawai dalam aplikasi RKAKL per golongan dari Bagian kepegawaian -mengupdate data RENJA dalam aplikasi KRISNA per periode	Salah menetapkan Perjanjian Kinerja
5	sda	Indikator kinerja tidak berbasis outcome	Indikator Kinerja kurang memenuhi kriteria SMART		Sekretariat ITJEN	Indikator disusun belum berbasis outcome	Internal	C	Indikator Kinerja tidak bisa dihitung capaian targetnya	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan DJA KEMENKEU, BAPPENAS, MENPAN dan APIP terkait penyusunan Indikator Kinerja berbasis SMART	-

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pihak yang Terkena	Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
6	sda	LAKIN tidak sesuai dengan RENSTRA	Keterlambatan penyusunan RENSTRA sebagai acuan pengawasan lima tahun		Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	-RPJMN terlambat ditetapkan oleh Presiden  -Kurang penyamaan persepsi tentang pembuatan Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai, potensi, permasalahan,, sasaran strategi, langkah strategi, indikator Kinerja Utama, indikator kinerja Kegiatan Target yang akan dicapai dan kerangka kebijakan, kerangka kelembagaan serta kerangka pendanaan dalam waktu lima tahun	Internal/ Eksternal	C/ UC	Salah menetapkan Peta Strategi	Inspektorat Jenderal	Pendampingan dengan DJA KEMENKEU, BAPPENAS, MENPAN dan APIP terkait penyusunan RENSTRA	Keterlambatan penyusunan RENSTRA sebagai acuan pengawasan lima tahun	
											Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan selaku penyusun RENSTRA KEMENKUMHAM agar RENSTRA ITJEN searah dengan RENSTRA KEMENKUMHAM		
											Membuat analisis SWOT dan TOWS atas Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada ITJEN		
											Melakukan evaluasi atas capaian target RENSTRA ITJEN periode lima tahun sebelumnya		
7	Nilai Maturitas SPIP ITJEN (level 4-terkelola dan terukur)	Pendokumentasian Pelaksanaan implementasi SPIP belum optimal di laksanakan	Maturitas SPIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Kompetensi SDM penyusun laporan penyelenggaraan SPIP kurang memahami 5 unsur pengendalian SPIP yang wajib dituangkan dalam laporan	Internal	C	menurunnya nilai pelaksanaan maturitas SPIP ITJEN	Inspektorat Jenderal	-Penyusunan Laporan SPIP -mengikuti workshop SPIP -menyusun SK Tim Penyelenggaraan SPIP	Maturitas SPIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	
	sda	sda	sda	sda	sda	Rekomendasi maturitas SPIP belum di tindaklanjuti seluruhnya	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Melakukan perbaikan penyelenggaraan maturitas SPIP ITJEN sesuai dengan rekomendasi		

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab		C/ UC	Dampak		Pihak yang Terkena	Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
8	sda	Manajemen Risiko ITJEN hanya sebagai pemenuhan dokumen	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Manajemen risiko belum menjadi bagian yang dianggap penting dalam pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Kinerja ITJEN tidak disusun berdasar penerapan manajemen risiko ITJEN	Inspektorat Jenderal	-Menyusun Penerapan manajemen Risiko ITJEN per tahun, disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja -melaksanakan evaluasi penerapan manajemen risiko -melaksanakan penanganan penerapan manajemen risiko -melaksanakan pemantauan penanganan penerapan manajemen risiko -menyusun laporan penerapan manajemen risiko ITJEN	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	
9	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi (82.%)	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN	Berkurangnya kepercayaan satker atas kompetensi APIP sebagai mitra kerja pemberi QA dan konsulting	Risiko Reputasi	Sekretariat ITJEN (Bagian kepegawaian)	-Kurangnya anggaran DIKLA	Eksternal	UC	Kinerja ITJEN tidak optimal	Kemenkumham	-Menyelenggarakan PKS, Workshop, FGD untuk memenuhi pengembangan kompetensi selain Diklat -Mengajukan diklat ke BPSDM -Sharing knowledge	Berkurangnya kepercayaan satker atas kompetensi APIP sebagai mitra kerja pemberi QA dan konsulting	
	sda	sda	sda	sda	Sekretariat ITJEN (Bagian kepegawaian)	Penempatan Pegawai belum sesuai dengan kebutuhan yang telah disusun per jabatan	Internal	C	Terdapat ITWIL/Bagian yang tidak mendapatkan pegawai hasil rekrutmen sesuai jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan	Inspektorat Jenderal	-Menyampaikan usulan penambahan pegawai sesuai analisis beban kerja - Penetapan Formasi Jabatan		
	sda	sda	sda	sda	Sekretariat ITJEN (Bagian kepegawaian)	Pola mutasi internal dalam melakukan pengembangan karir belum dilakukan mutasi antar jabatan secara berkala	Internal	C	-Rawan terjadi konflik dan benturan kepentingan -Dapat menghambat pengembangan karir Pegawai yang bersangkutan	Inspektorat Jenderal	-Rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar Jabatan Administrasi, Fungsional Umum (JFU), dan Fungsional Tertentu (JFT) -Mutasi Diagonal		
10	sda	Layanan kepegawaian belum optimal	Keterlambatan memberikan Layanan kepegawaian kehadiran pegawai, kenaikan pangkat gaji berkala, update data simpeg, cuti, disiplin pegawai dan lainnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian kepegawaian)	Pengusulan kenaikan pangkat/jabatan terlambat	Internal / Eksternal	C / UC	-Ketidakpuasan pegawai atas layanan kepegawaian (pangkat, jabatan, PAK, diklat) dan karir pegawai menjadi terhambat - Ketidakpuasan pegawai atas layanan kepegawaian (pangkat, jabatan, PAK, diklat) dan berkurangnya hak-hak finansial pegawai	Inspektorat Jenderal	Menyusun daftar nominatif kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, gaji berkala di awal tahun anggaran	-	

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	sda	sda	sda	sda	Keterlambatan terbitnya SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan	External	UC	Koordinasi intensif dengan Biro Kepegawaian dan KN	Inspektorat Jenderal	Melakukan konsiyering perihal kenaikan pangkat dan jabatan ke biro kepegawaian sekjen	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Simpeg tidak dilakukan <i>update</i> data secara berkala	Internal	C	Informasi data pegawai tidak akuntabel	Kemenkumham	-Melakukan update data oleh admin internal itjen - Melakukan rekon data pegawai antar bagian	-
	sda	sda	Tidak tercapainya target pengisian LHKASN di lingkungan Kemenkumham	Resiko Operasional	sda	Tidak updatenya data pegawai Wajib Lapor LHKASN	Internal	C	Tidak tercapainya pengisian LHKASN di lingkungan Kemenkumham	Kemenkumham	Sosialisasi mengenai LHKASN dan aplikasi pengisian LHKASN serta melakukan pendalaman terkait LHKASN kepada Admin LHKASN masing-masing satuan kerja	-
11	sda	sda	Pegawai ITJEN terlambat melaporkan LHKPN	Resiko Operasional	sda	-Adanya penambahan fitur tata cara penginputan aplikasi -Kurangnya respon pegawai yang wajib lapor LHKPN	Internal / Eksternal	C / UC	Keterlambatan pengisian LHKPN di Lingkungan Itjen	Kemenkumham	- PKS tata cara pengisian LHKPN - Sosialisasi	-
12	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham (Tingkat 3)	Tata nilai Kemenkumham belum optimal	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun sanksi hukdis yang dilakukan oleh pegawai ITJEN	Risiko Kepatuhan	sda	Belum ada mekanisme internalisasi tata nilai Kemenkumham	Internal	C	Pelanggaran meningkat	Inspektorat Jenderal	-Whorkshop budaya kerja	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun
									Tingkat persepsi integritas menurun	Inspektorat Jenderal	-arahan pimpinan	
									Kepercayaan terhadap ITJEN menurun	Inspektorat Jenderal	-Menetapkan agen perubahan	
						Tidak ada evaluasi terhadap para aagen perubahan / pegawai yang telah mengikuti TOT Tunas Integritas	Internal	C	Tidak ada role model / agen perubahan yang dapat memberikan nilai tambah untuk peningkatan kinerja ITJEN	Inspektorat Jenderal	-Diklat Settifikasi " Role Model / Agen Perubahan" dengan KPK dan lembaga pengembangan integritas - PKS integritas/ revolusi mental	
13	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal (82%)	Perencanaan Sistem Informasi pengawasan belum memiliki grand design	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian SIP)	Formasi SDM ITJEN yang memiliki latar belakang Teknologi Informasi belum terpenuhi	Eksternal	C	Kemajuan TI -ITEN tertinggal dibandingkan dengan TI unit eselon I lainnya	Inspektorat Jenderal	- Menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan
								UC	Keterbatasan pengetahuan tentang teknologi informasi terutama terkait pelaksanaan audit	Inspektorat Jenderal	-Diklat e-audit -Diklat TI	

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	sda	sda	sda	sda	Belum adanya perencanaan / grand design terkait Pengembangan teknologi Informasi	Internal	C	Informasi terkait hasil pengawasan belum optimal	Inspektorat Jenderal	Integrasi SIMWAS dan e-office	
	sda	sda	sda	sda	sda	Koneksi jaringan internet terputus	Internal	C	Penggunaan bandwidth tidak tepat guna	Inspektorat Jenderal	Penerapan bandwidth manager, firewall dan anti spyware	
	sda	sda	sda	sda	sda	Internet Service Provider down	Eksternal	UC	Koneksi internet terputus	Inspektorat Jenderal	Memakai lebih dari satu provider	
	sda	sda	sda	sda	sda	Terkena spyware dan banyak terinstall add on	Internal	C	Performa PC dan laptop rendah	Inspektorat Jenderal	Penggunaan firewall dan antivirus	
	sda	sda	SIMWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi	Risiko Operasional	sda	Pengembangan sistem informasi belum mengakomodir kebutuhan	Internal	C	Data hasil pengawasan tidak update bila digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Inspektorat Jenderal	Pengembangan SIMWAS	SIMWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar
	sda	sda	sda	sda	sda	penginputan data hasil pengawasan tidak dilakukan secara tepat waktu	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	komitmen bersama dalam penginputan hasil pengawasan pada aplikasi SIMWAS	
	sda	sda	sda	sda	sda	Belum dilakukan analisis terhadap hasil SIMWAS	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Dilakukan analisis atas hasil pengawasan	
	sda	sda	Informasi Sarana pengaduan belum optimal membantu masyarakat terkait pelaporan pengaduan	Risiko Operasional	Ses Itjen (Bag.SIP)	belum optimalnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat (layanan pengguna)	Eksternal	UC	Masyarakat tidak dapat menggunakan layanan pengaduan secara optimal	Kemenkumham	Penyebaran informasi layanan pengaduan kepada masyarakat, adanya jaminan kerahasiaan pelapor. Dan membangun SIPIDU dan E WAS (sistem informasi pengaduan integrasi dan terpadu)	Informasi Sarana pengaduan belum optimal membantu masyarakat terkait pelaporan pengaduan
	sda	sda	Data Hukuman Disiplin tidak update	Risiko Operasional	Ses Itjen (Bag.SIP)	Satker belum seluruhnya menyampaikan laporan data rekapitulasi hukuman disiplin pegawai	Eksternal	UC	Data belum terupdate pada database itjen	Inspektorat Jenderal	Surat edaran tertib administrasi laporan hukuman disiplin pegawai serta pengembangan Aplikasi Hukuman Disiplin dalam aplikasi SIMWAS VERSI 3.0	Data Hukuman Disiplin tidak update
	sda	sda	Data temuan tidak update	Risiko Operasional	Ses Itjen (Bag.SIP)	Tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK belum dituntaskan dalam SIPTL	Eksternal	UC	Masih ada temuan lama hasil pemeriksaan BPK	Inspektorat Jenderal	Surat edaran Irjen perihal penyelesaian tindak lanjut temuan BPK	Data temuan tidak update
	sda	sda	sda		sda	SIMWAS belum terintegrasi dengan SIPTL	Internal	C	Tidak dapat menyajikan data perkembangan tindak lanjut secara realtime	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan BPK untuk mengintegrasikan SIMWAS dan SIPTL	
	sda	sda	sda		sda	Kesalahan penginputan data dalam SIMWAS dan	Internal	C	Keterlambatan tindak lanjut	Inspektorat Jenderal	Kelengkapan data pendukung	

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	sda	sda		sda	Hasil pengawasan APIP terlambat diinput dalam SIMWAS	Internal	C	Pengelolaan data hasil pengawasan yang tidak update	Inspektorat Jenderal	komitmen bersama dalam penginputan temuan hasil pengawasan pada aplikasi simwas	
14	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel (85%)	Manajemen aset yang belum optimal	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	Risiko Operasional	Ses. Itjen (Bag Umum)	Operator BMN belum menyusun PSP atas BMN yang ada	Internal	C	1. Administrasi pengelolaan BMN belum tertib 2. Alokasi anggaran pemeliharaan terbatas	Inspektorat Jenderal	1. Melakukan inventarisasi ulang seluruh BMN yang belum di PSP 2. Mempercepat proses PSP	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)
	sda	Keterlambatan pemrosesan surat masuk melalui	Informasi materi surat terlambat diterima pimpinan	Risiko Operasional	sda	Sisumaker sering down	Eksternal	UC	Pimpinan tidak dapat mendisposisikan secara tepat waktu	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan PUSDATIN KEMENKUMHAM	-
	sda	sda	Informasi materi surat terlambat dikirim ke unit terkait	Risiko Operasional	sda	Rendahnya respon dari penerima pesan	Internal	C	Informasi terlambat diterima oleh uit terkait	Inspektorat Jenderal	adanya SOP SISUMAKER	-
	sda	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif	Arsip hasil pengawasan dan administrasi rusak/	Risiko Operasional	sda	Kurang SDM JFT Arsiparis	Internal	C	Penumpukan arsip	Inspektorat Jenderal	SOP Pengarsipan (jadwal retensi arsip)	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Belum dilaksanakan retensi arsip	Internal	C	Pengelolaan Arsip kurang optimal	Inspektorat Jenderal	Penambahan JFT Arsiparis	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Gudang arsip yang beralokasi ditanggerang sebagian digunakan bukan untuk penempatan arsip	Internal	C	Gudang arsip di tanggerang menjadi sempit / terbatas/ tidak dapat menampung arsip	Inspektorat Jenderal	Gudang Arsip ditanggerang sudah difungsikan sebagai gudang arsip secara penuh, tidak ada lagi fungsi lain selain untuk arsip	-
	sda	Inventarisasi BMN tidak update	Aset BMN hilang	sda	sda	Inventarisasi aset BMN tidak dilaksanakan secara periodik	Internal	C	Jumlah dan keberadaan aset BMN tidak sama dengan yang tertera dalam data BMN	Inspektorat Jenderal	Inventarisasi aset BMN wajib dilaksanakan secara periodik	Aset BMN hilang
	sda	sda	sda	sda	sda	Pemindahan aset BMN antar ruangan tidak dilakukan sesuai prosedur	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Inventarisasi aset BMN tiap ruangan	
	sda	sda	sda	sda	sda	Aset BMN dibawa pegawai tidak sesuai dengan prosedur	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Penomoran aset	
	sda	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal	'Pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang belum optimal	Risiko Operasional	Ses Itjen (Bag. Umum)	Belum memiliki rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan jangka panjang 5 sd 10 tahun ke depan	Eksternal	UC	APIP dalam melakukan pengawasan belum bekerja secara maksimal	Inspektorat Jenderal	Sudah menyusun RKBMN	-
	sda	sda	Kebakaran Gedung	Risiko Operasional	sda	Konsleting listrik, merokok tidak pada tempatnya	Internal	C	Kerugian materil dan immaterial	Inspektorat Jenderal	Membuat aturan dilarang merokok di dalam gedung terkecuali di ruangan yang telah ditentukan dan ada ventilasi udaranya. Simulasi kebakaran untuk semua pegawai	-

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di	Pengadaan telat dilaksanakan	Risiko Operasional	KPADan ULP	ULP, Pejabat pengadaan dan PPK kurang respon	Internal	C	realisasi anggaran tpgadaan tidak terserap sesuai Procurement plan	Inspektorat Jenderal	-Menyusun RUP -Lelang Pra DIPA	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat
15	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Laporan keuangan ITJEN tidak akuntabel	Kesalahan penyajian dalam Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	RisikoKeuangan	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten di bidang Akuntansi Pemerintahan	Internal	C	Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal menjadi penyumbang tidak WTP-nya Laporan Keuangan Kementerian	Kemenkumham	- Mengikuti Sertifikasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) - Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Akuntansi Pemerintahan	Kekeliruan dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan
	sda	sda	sda	sda	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Update Aplikasi SAIBA yang tidak sinkron dengan update Aplikasi SIMAK BMN	Eksternal	UC	Munculnya perbedaan data antara data SAIBA dengan data SIMAK BMN	Kemenkumham	- Berkoordinasi dengan KPPN dan KPKNL - Berkoordinasi dengan Biro Keuangan - Rekonsiliasi data Laporan Keuangan	-
	sda	sda	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	Risiko Operasional	Ses. Itjen (Bag.Keu)	Adanya perubahan/ perbaikan pada data Kontrak/SPK karena data yang disajikan tidak lengkap	Internal	C	Adanya pengenaan denda keterlambatan	Inspektorat Jenderal	Melakukan koordinasi dengan ULP dan Penyedia	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani
	sda	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain	Perbedaan data realisasi penyerapan anggaran di Bagian Keuangan dengan Itwil/Bagian	Risiko Operasional	Ses. Itjen (Bag.Keu)	Keterlambatan dalam menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan pencatatan pertanggungjawaban	Internal	C	Realisasi anggaran tidak maksimal	Inspektorat Jenderal	Bagian keuangan dan Bendahara Pengeluaran melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan supaya segera melengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar setelah kegiatan selesai dilaksanakan	-
	sda	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Itjen	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	Risiko Operasional	Ses. Itjen (Bag. Keu)	Data dukung untuk persyaratan proses penyelesaian administratif Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi belum diserahkan oleh Pemegang/Penanggung Jawab Kendaraan kepada Tim TP/TGR	Internal	C	Adanya kerugian negara yang belum dapat dikembalikan/ dilakukan penyetoran ke kas negara	Kemenkumham	Permenkumham Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara pada Kemenkumham	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	Data SAIBA dan BMN tidak sinkron	Perbedaan antara data SAIBA dan data SIMAK BMN	Risiko Operasional	Ses. Itjen (Bag. Keu)	Adanya perbedaan pemahaman dan ketidak telitian antara operator SAIBA dan SIMAK BMN sehingga terjadi kesalahan dalam penginputan ke dalam aplikasi	Internal	C	Penyusunan Laporan Keuangan menjadi terhambat	Kemenkumham	- Melakukan koordinasi antara Bagian Keuangan dengan Bagian Umum - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal antara operator SAIBA dengan operator SIMAK BMN	-
	sda	Pembayaran tagihan pihak ketiga/penyedia belum tepat waktu	Pembayaran tagihan dari pihak ketiga/penyedia yang terlambat/belum diselesaikan	Risiko Keuangan	Ses Itjen (Bag. Keu)	Pihak ketiga/penyedia terlambat dalam menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pengeluaran	Eksternal	U/C	1. Pembayaran tagihan menjadi terlambat 2. Menimbulkan piutang pihak ketiga yang harus dialokasikan pada anggaran tahun berikutnya	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan pihak ketiga/penyedia supaya penyampaian tagihan dapat dilakukan segera sesuai jadwal yang telah disepakati dengan didukung dengan data yang lengkap	-
	sda	Masih terdapat Bendahara belum memiliki kompetensi yang memadai	Bendahara dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan belum ditunjang dengan kompetensi yang memadai	Risiko Operasional	Ses. Itjen (Bag. Keu)	Terdapat Bendahara yang belum mengikuti Diklat Perbendaharaan	Internal	U/C	Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kurang akuntabel	Inspektorat Jenderal	Mengusulkan Bendahara yang belum memiliki Sertifikasi untuk segera diikutsertakan Diklat Perbendaharaan atau mengikuti Bimtek tentang Perbendaharaan	-
16	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (90%)	kegiatan terlambat dipertanggung jawabkan	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	Risiko Operasional	Ses. Itjen (Bag. Keu)	Pengajuan usulan anggaran berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Kinerja pengelolaan uang persediaan rendah	Inspektorat Jenderal	-Membuat surat edaran Ses. ITJEN terkait batasan waktu usulan RAB dan KAK Pelaksanaan Kegiatan -Menunda pemberian uang kegiatan selanjut sebelum pertanggungjawaban yang terdahulu diselesaikan	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan
	sda	Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Pelaksana kegiatan tidak segera melengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar	Internal	C	Penggunaan anggaran negara tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dapat diyakinkan kebenarannya	Inspektorat Jenderal	Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi seluruh dokumen penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan
	sda	sda	sda	sda	sda	Dokumen realisasi belanja dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tidak memenuhi kriteria lengkap dan benar	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Bendahara Pengeluaran melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang belum melengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar	-

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	sda	sda	sda	sda	sda	PPK dan Pejabat Penguji SPM belum optimal dalam melakukan pengujian bukti tagihan	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	KPA meningkatkan pengendalian intern kepada Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPSPM dalam melakukan pengujian bukti tagihan maupun pembayaran	-
	sda	sda	Pagu Minus dalam pengelolaan anggaran	Risiko Operasional	Ses. Itjen (Bag.Keu)	Kesalahan pembebanan, penambahan belanja pegawai	Internal	C	Terdapat pagu yang minus antar kegiatan/ komponen/ sub komponen	Inspektorat Jenderal	- Pengajuan RAB pada saat penyusunan RKA-K/L maupun pada saat usulan Revisi wajib memperhatikan PMK tentang Bagan Akun Standar dan Realisasi SPAN - Revisi sebelum batas waktu revisi ditutup	-
	sda	sda	Pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan bukti	Risiko keuangan	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Kesalahan Pengajuan RAB	Internal	C	Pembayaran anggaran kegiatan tidak maksimal	Inspektorat Jenderal	Membayarkan anggaran kegiatan sebesar 80% dari Pagu yang diajukan	-
	sda	sda	sda	sda	sda	Verifikasi tidak dilakukan secara teliti	Internal	C	Kesalahan jumlah anggaran yang dibayarkan	Inspektorat Jenderal	mereviu kembali KAK dan RAB pelaksanaan yang diajukan oleh ITWIL/ Bagian	-
	sda	sda	anggaran perjalanan dinas belum dapat dibayarkan tepat waktu	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	kesalahan MAK dalam pengajuan perjaladin	Internal	C	keterlambatan pembayaran kegiatan perjalanan dinas	Inspektorat Jenderal	1. sudah adanya SOP pengajuan perjaladin 2. verifikasi RAB oleh Kasub Perjaladin	-
	sda	sda	Gaji yang diterima pegawai lebih/ kurang	Risiko keuangan	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Salah input data pada aplikasi GPP	Internal	C	Pengembalian/ pembayaran gaji oleh/ kepada pegawai	Inspektorat Jenderal	Verifikasi ulang data pegawai	-
	sda	sda	Terlambatnya pencairan anggaran	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Salah pembukuan pertanggungjawaban oleh bendahara	Internal	C	Anggaran kegiatan tidak tersedia	Inspektorat Jenderal	Supervisi oleh Kasub Perbendaharaan untuk setiap pertanggungjawaban	-
	sda	sda	Hilangnya berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Tidak tertib dalam pengarsipan berkas perjalanan dinas	Internal	C	Perjalanan Dinas tidak dapat dipertanggungjawaban kan dengan cepat sesuai waktu yang ditetapkan	Inspektorat Jenderal	Penerapan klasifikasi arsip/ berkas berdasarkan Inspektorat Wilayah dan Bagian	-
	sda	sda	Terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Perhitungan pengajuan LS tidak tepat	Internal	C	Sisa anggaran LS tidak dapat dipergunakan kembali	Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RAB yang diajukan	masih terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS
	sda	sda	Update data pegawai pada aplikasi GPP bermasalah	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Bag. Keu)	Terlambatnya pengajuan gaji pegawai ke KPPN	Eksternal	UC	Terlambatnya pembayaran gaji kepada pegawai	Inspektorat Jenderal	Mengupdate aplikasi GPP	-

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
17 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (no) kasus penyusunan yang terbukti dalam memfasilitasi peningkatan nilai RB, nilai SAKIP, nilai maturitas SPIP ITJEN	Kurang optimalnya peran POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN yang telah ditetapkan	-Potensi penyusunan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikkan nilai ITJEN  -Potensi penyusunan oleh POKJA kepada Kasub KRB	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Data dukung RB, SAKIP dan SPIP disampaikan oleh masing-masing pokja tidak lengkap	Internal dan eksternal	C dan UC	Nilai RB, SAKIP dan ITJEN buruk	Inspektorat Jenderal	Koordinasi POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN untuk menyampaikan laporan per triwulan secara tepat waktu	-Potensi penyusunan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikkan nilai ITJEN  -Potensi penyusunan oleh POKJA kepada Kasub KRB
18 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (no) kasus penyusunan yang terbukti dalam memberikan penilaian pada target kinerja ITJEN yang diturunkan ke Kantor Wilayah	Penilaian Target Kinerja Kantor Wilayah yang tidak tepat	Potensi menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Belum adanya kriteria baku dalam penilaian capaian kinerja Kantor Wilayah	Internal dan eksternal	C dan UC	Penilaian Target Kinerja Kantor Wilayah yang tidak tepat (bias)	KANWIL	Verifikasi bertahap atas hasil penilaian Target Kinerja Kantor Wilayah	Potensi menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL
19 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (no) kasus penyusunan yang terbukti dalam memberikan anggaran per jenis belanja dan per kegiatan per ITWIL dan Bagian	Pagu belanja non operasional masih dalam bentuk total bukan per kegiatan	Potensi menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian PHP)	Belum ada rumusan / formulasi baku tentang pembagian pagu belanja non operasional di ITJEN	Internal	C	pembagian pagu non operasional per ITWIL/Bagian secara tidak obyektif	Inspektorat Jenderal	Mengevaluasi dari capaian output, capaian indikator kinerja kegiatan dan realisasi anggaran 2 minimal tahun sebelumnya	Potensi menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar
20 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (no) kasus penyusunan yang terbukti dalam memfasilitasi pengelolaan kepegawaian ITJEN (mutasi, promosi, kenaikan pangkat dan pengelolaan umum kepegawaian lainnya)	Terdapat keterlambatan dalam memberikan layanan kepegawaian	Potensi menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian Kepegawaian)	Penyelesaian urusan kepegawaian di luar SOP	Internal	C	Tidak terpenuhinya hak-hak pegawai	Pegawai ITJEN	Mengoptimalkan kinerja bagian kepegawaian sesuai dengan SOP	Potensi menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab		C/ UC	Dampak		Pihak yang Terkena	Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
21 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (no) kasus penyusunan yang terbukti dalam pengadaan barang/jasa	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur	Potensi terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian Umum)	Pengendalian terkait pengadaan barang/jasa dari internal ITJEN belum optimal	Internal	C	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan standar	Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan SOP	Potensi terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	
22 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (no) kasus penyusunan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan keuangan	Terjadinya benturan kepentingan dalam pecepatan pemberian anggaran kegiatan	Potensi menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian Keuangan)	Pemberian layanan keuangan tidak sesuai SOP	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Inspektorat Jenderal	Menyusun rekapitulasi pengajuan anggaran harian	Potensi menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	
23 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (no) kasus penyusunan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan Teknologi Informasi	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan	Potensi merubah/ menghilangkan data dalam server	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian SIP)	User ID dan Password tidak terbatas pada pegawai tertentu	Internal	C	Data base pengawasan tidak update/ hilang	Inspektorat Jenderal	-User ID dan pasword khusus untuk pegawai yang menengani server -fakta integritas	Potensi merubah/ menghilangkan data dalam server	
24 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (no) kasus penyusunan yang terbukti dalam mengelola database temuan Pengawasan dan Pemeriksaan	Perbedaan data temuan	Potensi menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian SIP)	Tidak update input data dalam SIMWAS maupun SIPTL	Internal dan eksternal	C dan UC	Data base pengawasan tidak update/ hilang	Kemenkumham	Rekon Internal ITJEN maupun dengan BPK/BPKP/ORI	Potensi menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Kriteria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
25 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam mengelola database Hukuman Disiplin pegawai	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela	potensi pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian SIP)	Belum adanya SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	Internal dan Eksternal	C/ UC	Menurunkan citra ITJEN	Kemenkumham	Reviu berjenjang oleh pimpinan	potensi pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai
26 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	0 (nol) kasus penyusunan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan pengelolaan pengaduan, wbs dan gratifikasi	Layanan SIPUDU belum optimal	Potensi tidak memproses pengaduan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian SIP)	Adanya intervensi dari pihak internal/eksternal	Internal dan Eksternal	C/ UC	Pengaduan tidak ditindaklanjuti	Kemenkumham/ masyarakat	Melakukan monitoring atas pengaduan yang diterima secara berkala	Potensi tidak memproses pengaduan

Ket :Hasil pembahasantanggal

**KRITERIA RISIKO**

- Risiko Kebijakan= Risiko yang disebabkan kebijakan nasional, kebijakan anggaran, dan kebijakan internal yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan
- Risiko Reputasi= Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif
- Risiko Hukum= Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum.
- Risiko Keuangan= Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja dan mengurangi nilai asset/ merugikan keuangan negara.
- Risiko Operasional= Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan SOP, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
- Risiko Pelaporan= Risiko yang disebabkan oleh ketidakandalan pelaporan dalam pengambilan keputusan internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar terkait.
- Risiko Kepatuhan= Risiko yang disebabkan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ket :Hasil pembahasan dengan perwakilan sekretariat dan auditor tanggal 4 Februari 2021 serta masukan /saran dari ITWIL dan bagian melalui Nota Dinas Sumaker

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal  
 Nomor : ITJ-04.OT.03 Tahun 2021  
 Tanggal : 3 Maret 2021  
 Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : **Sekretariat Inspektorat Jenderal**  
 Periode Penerapan : Tahun 2021

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	Moderat	3	Kemenkumham	5	15	Kuning
2	Pelaksanaan RB ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
3	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
4	Salah menetapkan Perjanjian Kinerja	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
5	Keterlambatan penyusunan RENSTRA sebagai acuan pengawasan lima tahun	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
6	Maturitas SPIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
7	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
8	Berkurangnya kepercayaan satker atas kompetensi APIP sebagai mitra kerja pemberi QA dan konsulting	Moderat	3	Kemenkumham	5	15	Kuning
9	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun sanksi hukdis yang dilakukan oleh pegawai ITJEN	Moderat	3	Inspektoat Jenderal	4	12	Kuning
10	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Moderat	3	Inspektoat Jenderal	4	12	Kuning
11	SIMWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
12	Informasi Sarana pengaduan belum optimal membantu masyarakat terkait pelaporan pengaduan	Moderat	3	Kemenkumham	5	15	Kuning
13	Data Hukuman Disiplin tidak update	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	5	15	Kuning
14	Data temuan tidak update	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	5	15	Kuning
15	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
16	Aset BMN hilang	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
17	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
18	Kekeliruan dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan	Moderat	3	Kemenkumham	4	12	Kuning

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
19	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru
20	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	Sangat Kecil	1	Kemenkumham	4	4	Hijau
21	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
22	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
23	masih terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning
24 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	-Potensi penyuaian kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikkan nilai ITJEN  -Potensi penyuaian oleh POKJA kepada Kasub KRB	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
25 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	Sangat Kecil	1	KANWIL	3	3	Hijau
26 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
27 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	Kecil	2	Pegawai ITJEN	1	2	Hijau
28 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru
29 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru
30 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi merubah/ menghilangkan data dalam server	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau
31 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	KECIL	2	Kemenkum ham	4	8	Biru
32 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	potensi pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	Kecil	2	Kemenkum ham	4	8	Biru

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
33 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi tidak memproses pengaduan	Kecil	2	Kemenkum ham/ mayarakat	4	8	<b>Biru</b>

Ket :Hasil pembahasan dengan perwakilan sekretariat dan auditor tanggal 4 Februari 2021 serta masukan /saran dari ITWIL dan bagian melalui Nota Dinas Sumaker

### KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

### KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional	3
4	Unit Eselon I	Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan	5

Range	Warna	Level Risiko	
21-25	<b>MERAH</b>	5	sangat tinggi
16-20	<b>ORANGE</b>	4	tinggi
11-15	<b>KUNING</b>	3	sedang
6-10	<b>BIRU</b>	2	rendah
1-5	<b>HIJAU</b>	1	sangat rendah



Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko):

Matriks Analisis Risiko 5x5			DAMPAK				
			1 PEGAWAI	2 SATKER/UNIT	3 KANWIL/ESKLO	4 UNIT UTAMA	5 KEMENTERIAN
KEMUNGKINAN	5	PASTI	5	10	15	20	25
	4	HAMPIR PASTI	4	8	12	16	20
	3	MODERAT	3	6	9	12	15
	2	KECIL	2	4	6	8	10
	1	SANGAT KECIL	1	2	3	4	5
Warna			Level	Level dimulaidari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko		
Merah			5	21	Sangat Tinggi		
Oranye			4	16	Tinggi		
Kuning			3	11	Sedang		
Biru			2	6	Rendah		
Hijau			1	1	Sangat Rendah		

Kegiatan Analisis Risiko menghasilkan Peta Risiko yang dituangkan dalam

## Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor : ITJ-04.OT.03 Tahun 2021

Tanggal : 3 Maret 2021

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

## INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Inspektorat Jenderal

Periode Penerapan : Tahun 2021

No risik	No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
						Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman
1	1	2	3	4	5	6	7
	1	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	15	4	10	Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	0
	2	Pelaksanaan RB ITJEN diragukan akuntabilitasnya	12	11	8	Persentase rekomendasi RB Itjen yang belum ditindaklanjuti	5%
	3	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	12	12	8	Batas minimal rekomendasi SAKIP Itjen yg belum ditindaklanjuti	5%
	4	Salah menetapkan Perjanjian Kinerja	4	28	4	Risiko yang berada di tingkat risiko 1 sd 8 (hijau dan biru) adalah berada di area risiko yang dapat diterima / risk appetite.	
	5	Keterlambatan penyusunan RENSTRA sebagai acuan pengawasan lima tahun	4	29	4	Dalam Permenkumham bahwa risiko yang berada di area dapat diterima/risk appetite tidak wajib disusun indikator risikonya, namun dalam pelaksanaan tetap dilakukan pemantauan apakah risiko dimaksud bergerak ke tingkat risiko 11 sd 25 (kuning/orange/merah)	
	6	Maturitas SPIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	12	10	8	Persentase rekomendasi maturitas SPIP ITJEN yang belum ditindaklanjuti	5%
	7	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	12	7	8	Persentase risiko yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut setelah mitigasi	95%
	8	Berkurangnya kepercayaan satker atas kompetensi APIP sebagai mitra kerja pemberi QA dan konsulting	15	3	10	Persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi baik pengembangan manajemen/manjerial, substantif, keteampilan dan keahlian per tahun	75%
	9	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun sanksi hukdis yang dilakukan oleh pegawai ITJEN	12	6	8	Presentase pegawai ITJEN yang memperoleh hukuman disiplin	1%
	10	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	12	15	8	Persentase sistem informasi yang belum terpenuhi untuk menunjang pengawasan	20%
	11	SIMWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	12	14	8	Persentase jumlah temuan yang belum diinput dalam Simwas oleh auditor	5%
	12	Informasi Sarana pengaduan belum optimal membantu masyarakat terkait pelaporan pengaduan	15	5	10	Persentase pemanfaatan sarana pengaduan	90%
	13	Data Hukuman Disiplin tidak update	15	1	10	Persentase kesalahan rekap data hukuman disiplin untuk bahan pimpinan, yang tidak update	0.5%
	14	Data temuan tidak update	15	2	10	Persentase minimal data simwas dan SIPTL yang belum diupdate	10%

No risik	No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
						Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman
1	1	2	3	4	5	6	7
	15	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	4	30	4	Risiko yang berada di tingkat risiko 1 sd 8 (hijau dan biru) adalah berada di area risiko yang dapat diterima / risk appetite. Dalam Permenkumham bahwa risiko yang berada di area dapat diterima/risk appetite tidak wajib disusun indikator risikonya, namun dalam pelaksanaan tetap dilakukan pemantauan apakah risiko dimaksud bergerak ke tingkat risiko 11 sd 25 (kuning/orange/merah)	
	16	Aset BMN hilang	12	8	8	Persentase nilai aset BMN yang hilang dibanding dengan total nilai aset	0.5%
	17	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	12	13	8	Persentase nilai belanja modal yang baru dilaksanakan pada bulan November tahun berjalan dibandingkan dengan total nilai belanja modal	10%
	18	Kekeliruan dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan	12	9	8	Persentase kesalahan dalam menyusun catatan atas laporan keuangan	0.5%
	19	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	8	25	4	Risiko yang berada di tingkat risiko 1 sd 8 (hijau dan biru) adalah berada di area risiko yang dapat diterima / risk appetite. Dalam Permenkumham bahwa risiko yang berada di area dapat diterima/risk appetite tidak wajib disusun indikator risikonya, namun dalam pelaksanaan tetap dilakukan pemantauan apakah risiko dimaksud bergerak ke tingkat risiko 11 sd 25 (kuning/orange/merah)	
	20	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	4	27	4	Risiko yang berada di tingkat risiko 1 sd 8 (hijau dan biru) adalah berada di area risiko yang dapat diterima / risk appetite. Dalam Permenkumham bahwa risiko yang berada di area dapat diterima/risk appetite tidak wajib disusun indikator risikonya, namun dalam pelaksanaan tetap dilakukan pemantauan apakah risiko dimaksud bergerak ke tingkat risiko 11 sd 25 (kuning/orange/merah)	
	21	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	12	17	8	Persentase perbedaan realisasi anggaran antara SPAN dengan yang belum dibukukan	20%
	22	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	12	16	8	Persentase realisasi anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan	95%
	23	masih terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	12	18	8	Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%
	24 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	-Potensi penyuaan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikkan nilai ITJEN  -Potensi penyuaan oleh POKJA kepada Kasub KRB	4	32	4	-Jumlah kasus penyuaan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikkan nilai ITJEN -Jumlah kasus penyuaan oleh pokja kepada Kasub RB	0
	25 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	3	31	4	Jumlah kasus menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	0
	26 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	4	33	4	Jumlah kasus menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	0

No risik	No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
						Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman
1	1	2	3	4	5	6	7
	27 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	2	26	2	Jumlah kasus menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian	0
	28 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	8	19	4	Jumlah kasus menerima suap dalam pengadaan untuk menguntungkan salah satu peserta pengadaan	0
	29 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	8	24	4	Jumlah kasus menerima suap dari pegawai dalam upaya mempercepat ketersediaan anggaran	0
	30 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi merubah/ menghilangkan data dalam server	4	23	4	Jumlah kasus menghilangkan data dalam server	0
	31 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	8	22	4	Jumlah kasus pegawai menghilangkan data base temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan	0
	32 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	potensi pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	8	20	4	Jumlah kasus pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	0
	33 (MR ISO SMAP Kegiatan Sekretariat ITJEN)	Potensi tidak memproses pengaduan	8	21	4	Jumlah kasus menerima suap dari masyarakat dan/atau pegawai untuk tidak memproses pengaduan	0

Ket :Hasil pembahasan dengan perwakilan sekretariat dan auditor tanggal 4 Februari 2021 serta masukan /saran dari ITWIL dan bagian melalui Nota Dinas Sumaker

## Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor : ITJ-04.OT.03 Tahun 2021

Tanggal : 3 Maret 2021

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

## RENCANA AKSI MITIGASI/PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Inspektorat jenderal

Periode Penerapan : 2021

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	0	Mengurangi Risiko	Kegiatan bulan tertib pungli dan kegiatan UPP ke satker	Laporan kegiatan bulan tertib pungli dan Laporan kegiatan UPP ke satker dalam setahun	2	November tahun berjalan	Tim Sapu bersih pungli ITJEN dan Bagian SIP	
2	Persentase rekomendasi RB Itjen yang belum ditindaklanjuti	5%	Mengurangi Risiko	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi evaluasi RB ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evaluasi RB Itjen	1	Maret tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
3	Batas minimal rekomendasi SAKIP Itjen yg belum ditindaklanjuti	5%	Mengurangi Risiko	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi evaluasi SAKIP ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evaluasi SAKIP Itjen	1	desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
4	Persentase rekomendasi maturitas SPIP ITJEN yang belum ditindaklanjuti	5%	Mengurangi Risiko	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi Maturitas SPIP ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evaluasi Maturitas SPIP Itjen	1	desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
5	Persentase risiko yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut setelah mitigasi	95%	Mengurangi Risiko	Evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko dilingkungan Itjen	Laporan pemantauan mitigasi risiko	2	Juli dan desember	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
6	Persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi baik pengembangan manajemen/manjerial, substantif, keteampilan dan keahlian per tahun	75%	Mengurangi Risiko	Kegiatan pengembangan diklat/ PKS/workshop/FGD, sosialisasi untuk kompetensi pegawai	Laporan evaluasi diklat yang berisi analisa kebutuhan diklat dengan diklat yang telah dipenuhi serta data kompetensi pegawai	2	Juli dan desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian Kepegawaian)	
7	Presentase pegawai ITJEN yang memperoleh hukuman disiplin	1%	Mengurangi Risiko	Internalisasi /pengarahan oleh pimpinan dan pemberian efek jera	Rekap data hukuman didiplin pegawai Itjen	1	Desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
8	Persentase sistem informasi yang belum terpenuhi untuk menunjang pengawasan	20%	Mengurangi Risiko	Penyusunan grand design sistem informasi ITJEN	Dokumen grand design TI Itjen	1	Oktober tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
9	Persentase jumlah temuan yang belum diinput dalam Simwas oleh auditor	5%	Mengurangi Risiko	Rekon data temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan auditor ITJEN dan BPK	Laporan rekon data temuan	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
10	Persentase pemanfaatan sarana pengaduan	90%	Mengurangi Risiko	Rekon data pengaduan dengan auditor	Rekap data SIPIDU dan laporan rekon data pengaduan	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
11	Persentase kesalahan rekap data hukuman disiplin untuk bahan pimpinan, yang tidak update	1%	Mengurangi Risiko	Rekon data Hukuman didiplin dengan auditor dan Biro kepegawaian	Laporan rekon data temuan	2	Semester	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
12	Persentase nilai aset BMN yang hilang dibanding dengan total nilai aset	10%	Mengurangi Risiko	Rekon data BMN dengan data inventaris per ruangan	Laporan Rekon data BMN	1	desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian Umum)	
13	Persentase nilai belanja modal yang baru dilaksanakan pada bulan November tahun berjalan dibandingkan dengan total nilai belanja modal	0%	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan lelang sesuai dengan Disbursement plan dan RUP yang telah ditetapkan	Laporan realisasi kegiatan pengadaan	1	desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian Umum)	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Persentase kesalahan dalam menyusun catatan atas laporan keuangan	1%	Mengurangi Risiko	Rekon pertanggungjawaban keuangan dengan ITWIL dan Bagian	Notula rekon berkala	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian Keuangan)	
15	Persentase perbedaan realisasi anggaran antara SPAN dengan yang belum dibukukan	20%	Mengurangi Risiko	Mempercepat kegiatan pembukuan keuangan agar realisasi SPAN bisa sama dengan pertanggung jawaban real yg telah diselesaikan	Data SPAN dan data yang belum di bukuk	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian Keuangan)	
16	Persentase realisasi anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan	95%	Mengurangi Risiko	Movev hasil smart, movev hasil RKP dan hasil e-performance	Dokumen movev yang berisi Persentase realisasi anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama dan	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	-
17	Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%	Mengurangi Risiko	Penyusunan data pengajuan LS yang angagrannya kembali ke kas negara	Laporan data LS	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
18 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	-Jumlah kasus penyuaipan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikkan nilai ITJEN -Jumlah kasus penyuaipan oleh pokja kepada Kasub RB	0%	Mengurangi Risiko	Merubah susunan Tim RB, SPIP, SAKIP dan lainnya, dengan membagi per ITWIL dan per Bagian sebagai koordinator, sehingga bisa lebih fokus. Tidak lagi membagi perorangan dalam satu tim	Surat Keputusan Tim tentang Koordinator	1	Februari tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
19 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	0%	Mengurangi Risiko	Membuat kriteria penilaian Target Kinerja turunan ITJEN ke KANWIL, sehingga lebih independen dalam menilai Target Kinerja	Diskusi dengan Kasubbag Evalap dan staf tentang Kriteria Penilaian Target Kinerja turunan ITJEN ke KANWIL	1	April, Juli, Okt dan Des Tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
20 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	0%	Mengurangi Risiko	Membuat kriteria pembagian pagu non operasional per ITWIL/ Bagian berdasarkan realisasi dan capaian output serta jenis sub komponen kegiatan 2 tahun terakhir, sehingga lebih independen	Dokumen Kriteria Pembagian pagu belanja operasioanl	1	Periode pagu indikatif	Sekretaris ITJEN (Bagian PHP)	
21 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian	0%	Mengurangi Risiko	Melaksanakan kegiatan pengukuran internalisasi tata nilai	Laporan kegiatan pengukuran internalisasi tata nilai	1	Juli tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian Kepegawaian)	
22 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dalam pengadaan untuk menguntungkan salah satu peserta pengadaan	0%	Mengurangi Risiko	Pendampingan oleh auditor pada saat proses pengadaan	Jumlah kegiatan pendampingan/reviu	1	November 2020	Sekretaris ITJEN (Bagian Umum)	
23 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dari pegawai dalam upaya mempercepat ketersediaan anggaran	0%	Mengurangi Risiko	Membangun sistem antrian layanan keuangan	Sistem antrian layanan keuangan	1	Juni tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian Keuangan)	
24 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menghilangkan data dalam server	0%	Mengurangi Risiko	Menunjuk pegawai yang diberi tugas untuk mengelola data server (pembatasan akses)	Surat penunjukan pegawai	1	Maret tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus pegawai menghilangkan data base temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan	0%	Mengurangi Risiko	Menunjuk pegawai yang diberi tugas untuk mengelola data temuan pengawasan dan pemeriksaan	Surat penunjukan pegawai		Maret tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
26 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	0%	Mengurangi Risiko	Menyusun SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	1	Juni tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	
27 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Jumlah kasus menerima suap dari masyarakat dan/atau pegawai untuk tidak memproses pengaduan	0%	Mengurangi Risiko	Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan KPK tentang WBS dan membangun integrasi sistem pengaduan	- Dokumen PKS - Integrasi aplikasi pengaduan (SIPIDU)	2	Desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Bagian SIP)	

Ket :Hasil pembahasan dengan perwakilan sekretariat dan auditor tanggal 4 Februari 2021 serta masukan /saran dari ITWIL dan bagian melalui Nota Dinas Sumaker

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal  
 Nomor : ITJ-04.OT.03 Tahun 2021  
 Tanggal : 3 Maret 2021  
 Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

**PEMANTAUAN RISIKO**

Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Inspektorat jenderal  
 Periode Penerapan : 2021

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11= kolom 10 indikator risk x kolom 5	11=10* (toleransi Risiko)	12
1	Kegiatan bulan tertib pungli dan kegiatan UPP ke satker	Laporan kegiatan bulan tertib pungli dan Laporan kegiatan UPP ke satker dalam setahun	2			Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	0					
2	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi evaluasi RB ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evaluasi RB Itjen	1			Persentase rekomendasi RB Itjen yang belum ditindaklanjuti	5%					
3	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi evaluasi SAKIP ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evaluasi SAKIP Itjen	1			Batas minimal rekomendasi SAKIP Itjen yg belum ditindaklanjuti	5%					
4	Monev atas tindaklanjut pemenuhan rekomendasi Maturitas SPIP ITJEN	Surat jawaban menindaklanjuti temuan evaluasi Maturitas SPIP Itjen	1			Persentase rekomendasi maturitas SPIP ITJEN yang belum ditindaklanjuti	5%					
5	Evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko di lingkungan Itjen	Laporan pemantauan mitigasi risiko	2			Persentase risiko yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut setelah mitigasi	95%					
6	Kegiatan pengembangan diklat/ PKS/workshop/FGD, sosialisasi untuk kompetensi pegawai	Laporan evaluasi diklat yang berisi analisa kebutuhan diklat dengan diklat yang telah dipenuhi serta data kompetensi pegawai	2			Persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi baik pengembangan manajemen/manjerial, substantif, keteampilan dan keahlian per tahun	75%					
7	Internalisasi /pengarahan oleh pimpinan dan pemberian efek jera	Rekap data hukuman didiplin pegawai Itjen	1			Presentase pegawai ITJEN yang memperoleh hukuman disiplin	1%					
8	Penyusunan grand design sistem informasi ITJEN	Dokumen grand design TI Itjen	1			Persentase sistem informasi yang belum terpenuhi untuk menunjang pengawasan	20%					

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11= kolom 10 indikator risk x kolom 5	11=10* (toleransi Risiko)	12
9	Rekon data temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan auditor	Laporan rekon data temuan	4			Persentase jumlah temuan yang belum diinput dalam Simwas oleh auditor	5%					
10	Rekon data pengaduan dengan auditor	Rekap data SIPIDU dan laporan rekon data pengaduan	4			Persentase pemanfaatan sarana pengaduan	90%					
11	Rekon data Hukuman didiplin dengan auditor dan Biro kepegawaian	Laporan rekon data temuan	2			Persentase kesalahan rekap data hukuman disiplin untuk bahan pimpinan, yang tidak update	1%					
12	rekon data BMN dengan data inventaris per ruangan	Laporan Rekon data BMN	1			Persentase nilai aset BMN yang hilang dibanding dengan total nilai aset	10%					
13	Pelaksanaan lelang sesuai dengan Disbushement plan dan RUP yang telah di tetapkan	Laporan realisasi kegiatan pengadaan	1			Persentase nilai belanja modal yang baru dilaksanakan pada bulan November tahun berjalan dibandingkan dengan total nilai belanja modal	0%					
14	Rekon pertanggungjawaban keuangan dengan ITWIL dan Bagian	Notula rekon berkala	4			Persentase kesalahan dalam menyusun catatan atas laporan keuangan	1%					
15	Mempercepat kegiatan pembukuan keuangan agar realisasi SPAN bisa sama dengan pertanggung jawaban real yg telah diselesaikan Bagian/Itwil	Data SPAN dan data yang belum di bukukan	4			Persentase perbedaan realisasi anggaran antara SPAN dengan yang belum dibukukan	20%					
16	Monev hasil smart, monev hasil RKP dan hasil e-performance	Dokumen monev yang berisi Persentase realisasi anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan	4			Persentase realisasi anggaran yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan	95%					
17	Penyusunan data pengajuan LS yang anggarannya kembali ke kas negara	Laporan data LS	4			Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%					
18 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Merubah susunan Tim RB, SPIP, SAKIP dan lainnya, dengan membagi per ITWIL dan per Bagian sebagai koordinator, sehingga bisa lebih fokus. Tidak lagi membagi perorangan dalam satu tim	Surat Keputusan Tim tentang Koordinator	1			-Jumlah kasus penyuaipan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikan nilai ITJEN -Jumlah kasus penyuaipan oleh pokja kepada Kasub RB	0%					

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11= kolom 10 indikator risk x kolom 5	11=10* (toleransi Risiko)	12
19 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Membuat kriteria penilaian Target Kinerja turunan ITJEN ke KANWIL, sehingga lebih independen dalam menilai Target Kinerja	Diskusi dengan Kasubbag Evalap dan staf tentang Kriteria Penilaian Target Kinerja turunan ITJEN ke KANWIL	1			Jumlah kasus menerima suap dari Kanwil agar ITJEN memberikan penilaian yang bagus untuk TARJA KANWIL	0%					
20 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Membuat kriteria pembagian pagu non operasional per ITWIL/ Bagian berdasarkan realisasi dan capaian output serta jenis sub komponen kegiatan 2 tahun terakhir, sehingga lebih independen	Dokumen Kriteria Pembagian pagu belanja operasioanl	1			Jumlah kasus menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	0%					
21 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Melaksanakan kegiatan pengukuran internalisasi tata nilai	Laporan kegiatan pengukuran internalisasi tata nilai	1			Jumlah kasus menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian	0%					
22 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Pendampingan oleh auditor pada saat proses pengadaan	Jumlah kegiatan pendampingan/reviu	1			Jumlah kasus menerima suap dalam pengadaan untuk menguntungkan salah satu peserta pengadaan	0%					
23 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Membangun sistem antrian layanan keuangan	Sistem antrian layanan keuangan	1			Jumlah kasus menerima suap dari pegawai dalam upaya mempercepat ketersediaan	0%					
24 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Menunjuk pegawai yang diberi tugas untuk mengelola data server (pembatasan)	Surat penunjukan pegawai	1			Jumlah kasus menghilangkan data dalam server	0%					
25 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Menunjuk pegawai yang diberi tugas untuk mengelola data temuan pengawasan dan pemeriksaan	Surat penunjukan pegawai	-			Jumlah kasus pegawai menghilangkan data base temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan	0%					
26 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Menyusun SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	1			Jumlah kasus pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat	0%					
27 (MR ISO SMAP Sekretariat Itjen)	Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan KPK tentang WBS dan membangun integrasi sistem	- Dokumen PKS - Integrasi aplikasi pengaduan (SIPIDU)	2			Jumlah kasus menerima suap dari masyarakat dan/atau pegawai untuk tidak memproses pengaduan	0%					

Ket :Hasil pembahasan dengan perwakilan sekretariat dan auditor tanggal 4 Februari 2021 serta masukan /saran dari ITWIL dan bagian melalui Nota Dinas Sumaker

**Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI**  
 Alamat : JL. HR. Rasuna Said Kav. 8, Setiabudi, Kuningan Jakarta Selatan

**LEMBAR DISPOSISI**  
**BAGIAN PROGRAM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN**

Nomor Agenda : ( 3654 )      Jenis Surat : UM / UMUM

Nomor/Tanggal : ITJ.1.UM.01.01-529/II/2021 / 02 Mar 2021

Asal Surat : Disposisi Irjen

Isi Ringkas : Penyampaian draft SKU Inspektur Jenderal tentang pengelola penerapan manajemen resiko pada unit pemilik resiko (UPR) unit utama tahun 2021

Diterima Tanggal : 03 Mar 2021      Penguat : Inas Maisa

Isi Disposisi :	Diteruskan kepada :	Instruksi :
<p>Evalap xg PUNFO            - Segera Beri no frast.            ✓ Piagam MR dan satu lagi ✓ SK UPR. (no beda)            - stempel, scan.            - scan kirim ✓ teteh fuga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Subbag Penyusunan Rencana dan Anggaran</li> <li>○ Subbag Kelembagaan dan RB</li> <li>○ Subbag Hubungan Masyarakat</li> <li>○ Subbag Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Catat dan Teliti/Analisa</li> <li>○ Pelajari dan Bicarakan</li> <li>○ Untuk Diketahui</li> <li>○ Catat dan Satukan Berkas</li> <li>○ Catat dan File</li> <li>○ Catat dan Tindaklanjuti</li> <li>○ Catat dan Monitor</li> </ul>

Catatan Kasub :	Diteruskan kepada :	
<p>- konsep nohin ses ke (hul dan bagian ttg penyampaian MR Irjen th 2021 sby bahan pemanfaatan TBU-I th 2021 / penanganan Risiko rjk.            - URUTAN MR scan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fitri</li> <li>○ Novas</li> <li>○ Ivan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indah</li> <li>○ Lucky</li> <li>○ Bobby</li> <li>✓ Agung</li> <li>✓ Prisi</li> <li>✓ Erviana</li> <li>✓ Yora</li> <li>○ Paron</li> <li>○ Ratna</li> <li>○ Inas</li> </ul>

1. Piagam MR.
2. SK-UPR.
3. MR level Program
4. MR level Hul
3. MR level sekt.
4. Mohin ?? dan dispo ??



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. HR Rasuna Said Kav 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan Tlp/Fax. 021-5252984

**LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**

No. Adm/Agenda: **1099**

Tk.Keamanan  
Penyelesaian

SR	R	B
SS	S	B

Diterima Tgl : 02 March 2021  
Nomor / Tgl : ITJ.1.UM.01.01-529/II/2021 / 25-02-2021  
Asal : Disp. Inspektur Jenderal  
Klasifikasi : JUKTIB/LHA/LHP/Tindak Lanjut/Tanggapan  
Isi Ringkasan : Penyampaian draft SK Inspektur Jenderal tentang pengelola penerapan manajemen resiko pada unit pemilik risiko (UPR) unit utama tahun 2021

**DITERUSKAN KEPADA**

**DISPOSISI**

Kepala Bagian PHP

Siapkan Nodin / Surat

Laporkan

Kepala Bagian Kepegawaian

Proses

Hadiri

Kepala Bagian SIP

Bahan Laporan

Segera TL

Kepala Bagian Keuangan

Buat Telaahan

Buat Laporan

Kepala Bagian Umum

Siapkan SP

Edarkan

.....

Siapkan Rapat

File

.....

Copy ..... x,  
Asli .....

**CATATAN :**

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :  
Kepada / Tgl :

Paraf

*Handwritten signature and date 27/2*

-simon-



## LEMBAR DISPOSISI INSPEKTUR JENDERAL

No Admin : 842

Tingkat Keamanan  
Penyelesaian

SR	R	B
SS	S	B

Diterima Tgl : 25 February 2021  
Nomor / Tgl : ITJ.1.UM.01.01-529/II/2021 / 25-02-2021  
Asal : Sekretaris Itjen  
Klasifikasi : Surat Masuk  
Isi Ringkasan : Penyampaian Draft SK Inspektur Jenderal tentang Pengelola Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Unit Utama tahun 2021

## DITERUSKAN KEPADA

- Sekretaris Inspektorat Jenderal**  
 **Inspektur Wilayah I**  
*Itjen / Balitbang Hk dan HAM / Aceh / Banten/Kalbar/Sulsel/Kepri*  
 **Inspektur Wilayah II**  
*Ditjen PAS / DItjen HAM / Riau / Jabar / Kalteng/NTB/Sultra/Maluku*  
 **Inspektur Wilayah III**  
*Ditjen AHU/Sumbar/Jambi/DKI Jakarta/Kalsel/Sulut/Papua*  
 **Inspektur Wilayah IV**  
*Setjen/BPHN/Kep. Babel / Jateng/Kaltim/Bali/Sulbar*  
 **Inspektur Wilayah V**  
*Ditjen PP/Ditjen KI/Sumut/Sumsel/DI Yogyakarta/NTT/Maluku Utara*  
 **Inspektur Wilayah VI**  
*Ditjen Imigrasi / BPSDM / AKIP / AIM / Bengkulu / Lampung / Jatim / Sulteng / Gorontalo / Papua Barat*  
 **Kasubbag TU Pim**

## INSTRUKSI

- Laksanakan  Sesuai Catatan  Perbaiki / Review  
 Proses  Untuk perhatian  Dampingi  
 Jawab  Untuk Diketahui  Bicarakan dengan saya  
 Teliti dan Pendapat  Edarkan/ Umumkan  Gandakan / copy  
 Laporkan  Siapkan Bahan  Agendakan  
 Koordinasi / Monitor  Harap Hadir / Wakili  File

## CATATAN :

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :  
Kepada / Tgl :

Paraf

-rifan-



## INSPEKTORAT JENDERAL

Tanggal : 25 Februari 2021

No Admin : 842

Sifat : Biasa

Klasifikasi : -

Dengan hormat dihaturkan Draft Surat Keputusan Inspektur Jenderal perihal pengelolaan penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Unit Utama Tahun 2021.

Inti Surat :

Disampaikan

- Draft Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2021
- Draft Piagam Manajemen Risiko Tahun 2021
- Draft Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pengelolaan Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Unit Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mohon berkenan Bapak Inspektur Jenderal memberikan **tanda tangan**.

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**NOTA DINAS**

Nomor: ITJ.1.UM.01.01- 529 /II/2021

Yth. : Inspektur Jenderal  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Penyampaian *Draft* SK Inspektur Jenderal tentang Pengelola Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Unit Utama Tahun 2021  
Lampiran : 1 berkas  
Tanggal : 15 Februari 2021

---

1. Rujukan:

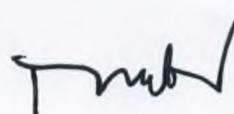
- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, dengan ini disampaikan:

- a) *Draft* Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2021;
- b) *Draft* Piagam Manajemen Risiko Tahun 2021;
- c) *Draft* Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pengelola Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Unit Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- d) Bahwa data Penerapan Manajemen Risiko dan *Draft* Piagam Manajemen Risiko merupakan hasil pembahasan dengan perwakilan dari Inspektorat Wilayah dan dari Bagian Sekretariat Inspektorat Jenderal, pada tanggal 4 Februari 2021 (Tim Penyusun Manajemen Risiko Tahun 2021). Serta masukan/saran yang kami terima melalui nota dinas sumaker dari Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian.

Untuk mohon arahan dan persetujuan Bapak Inspektur Jenderal.

3. Demikian kami sampaikan. Atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal, diucapkan terima kasih.



 Tholib  
NIP. 19630811 198811 1 001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**NOTA DINAS**

Nomor: ITJ.1.UM.01.01- 440 /II/2021

Yth. : 1. Inspektur Wilayah I s.d VI  
2. Para Kepala Bagian  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Permintaan Masukan Saran Terhadap Konsep Dokumen Manajemen Resiko ITJEN TA. 2021  
Lampiran : 3 (tiga) lampiran  
Tanggal : 05 Februari 2021

---

1. Merujuk Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.1.UM.01.01-392/II/2020 hal Undangan Rapat Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko Inspektorat Jenderal TA. 2021.
2. Bahwa berdasarkan rujukan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan rapat dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Telah disusun konsep Dokumen Manajemen Resiko ITJEN TA. 2021 berdasarkan Dokumen Manajemen Resiko TA. 2020;
  - b. Dimohon bantuan Saudara/i untuk memberikan masukan atas konsep Dokumen Manajemen Resiko ITJEN TA. 2021.
  - c. Agar masukan tersebut dapat disampaikan kepada kami melalui Bagian Program, Humas dan Pelaporan paling lambat tanggal 08 Februari 2021.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tholib  
NIP. 19630811 198811 1 001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**NOTA DINAS**

Nomor: ITJ.1.UM.01.01-392/II/2021

Yth. : 1. Para Inspektur Wilayah I s.d. VI  
2. Para Kepala Bagian  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Undangan Rapat Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 1 Februari 2021

---

1. Rujukan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko (MR) dan penyusunan Dokumen MR di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan:

- a. Agar Para Kepala Bagian menunjuk 4 (empat) orang pegawai untuk hadir pada:  
Hari/tanggal : **Kamis, 4 Februari 2020;**  
Waktu : **09:00 s.d. selesai;**  
Tempat : R. Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal;  
Acara : Penyusunan Dokumen MR pada tingkat tingkat UPR Unit Eselon II (tingkat Kegiatan Sekretariat ITJEN) Tahun 2021.
- b. Agar Para Inspektur Wilayah I s.d. VI menunjuk 3 (tiga) orang pegawai untuk hadir pada:  
Hari/tanggal : **Kamis, 4 Februari 2020;**  
Waktu : **13:30 s.d. selesai;**  
Tempat : R. Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal;  
Acara : Penyusunan Dokumen MR pada tingkat UPR Unit Utama ITJEN (tingkat Program) (ITJEN) dan penyusunan dokumen pada tingkat UPR Unit Eselon II (tingkat Kegiatan Inspektorat Wilayah) Tahun 2021.
- c. Agar Inspektur Wilayah I menunjuk 2 (dua) orang Auditor yang berkompeten di bidang Manajemen Risiko sebagai **Pendamping** Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Th.2021 untuk hadir pada seluruh rangkaian kegiatan rapat (satu orang auditor pendamping untuk sesi pagi dan satu orang auditor pendamping untuk sesi siang).

3. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tholib', located at the bottom right of the page.

Tholib  
NIP. 19630811 198811 1 001